



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Seri Satu Abad Kebangkitan Nasional



Prof. Dr. Slamet Muljana

KESADARAN NASIONAL

DARI KOLONIALISME
SAMPAI KEMERDEKAAN

JILID II



Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

KESADARAN NASIONAL

Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, Jilid II

Prof. Dr. Slamet Muljana

© LKiS, 2008

xii + 286 halaman; 21 x 14,5 cm

1. Kabinet Sjahrir 2. Perjanjian Linggajati

3. Republik Indonesia Serikat 4. Nasionalisme

ISBN: 979 1283 575

ISBN 13: 978 979 1283 571

Editor: Ahmala Arifin

Pemeriksa Aksara: Akhiriyati Sundari

Rancang sampul: Edy Susanto

Penata Isi: Santo

Penerbit:

LKiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194, 7472110

Faks.: (0274) 417762

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.co.id

Cetakan I: Mei 2008

Percetakan dan distribusi:

PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194, 7472110

Faks.: (0274) 417762

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.co.id

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	v
Pengantar Penulis	vii
Daftar Isi	vii

BAB I MASA PENDUDUKAN JEPANG 1

1. Jepang Mendarat 1
2. Politik Penjajahan Jepang 7
3. Pengerahan Tenaga dan Pangan 11
4. Janji Kemerdekaan 18
5. Gerakan Bawah Tanah 24

BAB II DI SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN 31

1. Perbedaan Siasat 31
2. Mengisi Proklamasi 39
3. Tanggapan Rakyat dan Lahirnya Tentara Nasional 48
4. Bentrok dengan Tentara Sekutu 53

BAB III LAHIRNYA DEMOKRASI LIBERAL 63

1. Pembentukan Partai Politik 63
2. Perebutan Pimpinan Revolusi 73
3. Watak Kabinet Sjahrir 79
4. Reaksi Tan Malaka 84

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

5. Persetujuan Linggajati ❧ 95
6. Kebulatan Tekad Bangsa Indonesia ❧ 115
7. Persoalan Indonesia di Gelanggang Internasional ❧ 118
8. Menuju Perundingan Renville ❧ 126
9. Nasib Persetujuan Renville ❧ 131

BAB IV KABINET HATTA DAN PERISTIWA MADIUN ❧ 135

1. Kabinet Pisau Cukur ❧ 135
2. Sikap Sayap Kiri terhadap Kabinet Hatta ❧ 143
3. Tindakan Kabinet Pisau Cukur ❧ 148
4. Dua Blok Kuasa Besar ❧ 156
5. Kongres Calcutta ❧ 159
6. Hubungan Uni Soviet-Indonesia ❧ 160
7. Jalan Baru untuk Republik Indonesia ❧ 163
8. Tanggapan Kabinet Hatta ❧ 167
9. Pelaksanaan Rencana Pengacauan ❧ 171
10. Pengacauan Kota Surakarta ❧ 174
11. Tindakan Revolusioner FDR ❧ 178
12. Daerah Pertahanan ❧ 181
13. Reaksi Pemerintah Republik Indonesia ❧ 183
14. Pembebasan Kota Madiun ❧ 185
15. Kerugian Moral dan Material ❧ 189

BAB V PERUBAHAN SIKAP BELANDA ❧ 191

BAB VI AKSI MILITER BELANDA YANG KEDUA ❧ 201

1. Tentara Belanda Menyerbu Yogyakarta ❧ 201
2. Pertahanan TNI ❧ 206
3. Kegagalan Membentuk Pemerintahan ❧ 209
4. Perang Gerilya ❧ 212
5. Reaksi terhadap Serbuan Belanda ❧ 218

BAB VII KONFERENSI ANTARINDONESIA ❧ 235

BAB VIII KONFERENSI MEJA BUNDAR ❧ 241

BAB IX NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT ❧ 253

1. Bentuk dan Sistem Pemerintahan ❧ 253

2. Pemberontakan Tentara ❧ 258

Glosari ❧ 271

Bibliografi ❧ 273

Indeks ❧ 277

Biodata Penulis ❧ 285

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Bab I

MASA PENDUDUKAN JEPANG

1. Jepang Mendarat

Bala tentara Jepang mendarat di Palembang tanggal 14 Februari 1942, tiga minggu sebelum pendaratan di Jawa. Pemimpin-pemimpin organisasi politik di Sumatra Selatan mulai mempersoalkan nasib Soekarno yang diasingkan ke Bengkulu oleh pemerintah Belanda. Pemuka-pemuka Gerindo, seperti Dr. A.K. Gani, Nungtjik Ar, dan A.S. Sumadi, serta pemuka Parindra, seperti Dr. M. Isa, berusaha mencari Soekarno di tempat pengasingannya. Tempat pengasingan di Bengkulu telah kosong karena Soekarno telah dipindahkan ke tempat lain oleh pihak Belanda karena khawatir jangan-jangan Soekarno akan dimanfaatkan pihak Jepang. Pihak Belanda bermaksud mengungsikan Soekarno ke Australia bersama-sama dengan orang-orang Belanda. Kapal yang akan mengangkutnya berlabuh di Teluk Bayur, di sebelah barat kota Padang, hanya menunggu kedatangan Soekarno. Ketika tentara Jepang sampai di jalan persimpangan Lubuk Linggau, tengah malam buta Soekarno diangkut dengan *pick up* di bawah kawalan empat orang polisi. Ikut serta ibu Inggit, Sukarti, Djuami, dan Riwu. Perjalanan dengan *pick up* hanya sampai Mukomuko, kemudian berganti kendaraan. Dari Mukomuko ke Padang, tidak dapat seluruhnya ditempuh dengan kendaraan bermotor karena jalan terlalu sempit. Melalui hutan

belukar, Soekarno dan keluarganya harus berjalan kaki. Sampai di Padang, terdengar kabar bahwa kapal yang akan mengangkutnya tenggelam di dekat Pulau Enggano. Dalam keadaan panik, orang-orang Belanda yang akan mengungsi ke Australia berebut tempat di kapal terbang. Menurut rencana, Soekarno dan keluarganya juga akan diangkut dengan kapal terbang, namun dalam keadaan panik itu Soekarno menyelip di rumah kawan lamanya di Bengkulu bernama Woworuntu. Karena panik, pihak Belanda tidak lagi memikirkan Soekarno, masing-masing mencari keselamatannya sendiri.

Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh pihak Belanda. Melihat kepanikan orang-orang Belanda, rakyat ikut kebingungan. Dalam kesempatan itu, Soekarno mengambil prakarsa untuk menenteramkan keadaan. Woworuntu dan Riwu disuruh mengumpulkan rakyat yang sedang kebingungan, kemudian Soekarno mengucapkan pidato singkat, memberi perintah agar jangan melawan tentara Jepang untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Rakyat dinasihati agar jangan bingung dan percaya kepada Allah. Rapat ditutup dengan doa bersama di bawah pimpinan Soekarno.

Hari berikutnya Soekarno mendapat kunjungan Kapten Sakaguci di rumah Woworuntu, yang menyampaikan undangan dari Kolonel Fujiyama, Panglima Tentara Pendudukan di Bukit Tinggi. Pertemuan Soekarno dengan Kolonel Fujiyama merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam penilaian perjuangannya di masa pendudukan Jepang karena pembicaraan Soekarno dengan Kolonel Fujiyama merupakan latar belakang tindakan-tindakannya. Singkatnya, pihak Jepang memerlukan Soekarno. Sebaliknya, Soekarno memerlukan pihak Jepang. Di antaranya, dikemukakan hal-hal dalam tanya-jawab di bawah ini:

Soekarno: Apakah ada jaminan bahwa saya juga diizinkan bekerja demi kepentingan bangsa, dalam pengertian bahwa pada akhirnya tujuan saya adalah melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang selama saya bekerja sama dengan tuan?

Fujiyama: Saya jamin. Pemerintah Jepang tidak akan menghalangi tuan. Tuan Soekarno, seperti tuan ketahui, saya adalah pegawai pemerintah. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur agama dan kebudayaan, seperti Jawa, Bali, Hindu, Budha, Belanda, Melayu, Polinesia, Cina, Filipina, dan Arab. Bangsa tuan tersebar luas. Hubungan satu sama lain sangat sulit. Tugas saya ialah berusaha mengatur pemerintahan di wilayah ini secepat mungkin. Cara yang paling efisien ialah segera menciptakan ketenangan dalam masyarakat sehingga rakyat dapat segera bekerja sebaik-baiknya. Untuk tujuan itu, kata orang, saya harus bekerja sama dengan Soekarno. Sebagai balasan, saya menjanjikan kerja sama secara resmi dan aktif dalam bidang politik.

Soekarno: baiklah jika demikian. Saya berjanji akan bekerja sama dengan tuan sepenuh tenaga. Saya akan mengadakan propaganda bagi tuan sejajar dengan cita-cita demi kepentingan bangsa Indonesia. Artinya, saya akan berkomplot dengan tuan, namun juga akan berusaha memperoleh kemerdekaan bangsa saya.

Fujiyama: Setuju.

Soekarno: Syarat bahwa saya akan tetap bekerja demi kepentingan nasionalisme, tidak hanya tuan saja yang harus mengetahui, tetapi supaya hal itu diketahui juga oleh Pemerintah Tertinggi.

Fujiyama: Pemerintah saya akan sangat setuju. Atas dasar ini kita mengadakan kerja sama dan saling membantu.

Selama di Sumatra, Soekarno sangat aktif membantu Pemerintah Pendudukan Jepang dalam soal pangan dan keamanan. Akan tetapi, kerja sama antara Soekarno dan Fujiyama tidak berlangsung lama karena Jenderal Imamura di Jakarta mengirim kawat kepada Kolonel Fujiyama untuk segera mengirim Soekarno ke Jakarta. Perintah militer harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditawar atau ditunda. Soekarno berangkat ke Jakarta melalui Palembang. Di Palembang, ia harus menunggu sebulan karena komandan militer di Palembang menunda keberangkatannya demi kepentingan pemerintahan di Palembang.

Di Palembang, Soekarno diminta bantuannya untuk menenangkan rakyat. Ia berangkat ke Jakarta naik perahu bermotor dengan ukuran 8 m panjangnya, dikawal oleh seorang kapten dan dua orang prajurit. Perjalanan dari Palembang ke Jakarta memakan waktu empat hari empat malam. Sesampainya di Jakarta, ada orang yang datang menjemputnya. Dengan perantaraan seorang nelayan, ia memberitahukan kedatangannya kepada Anwar Cokroaminoto, Sartono, dan Mohammad Hatta.

Setibanya di Jakarta, Soekarno segera menghubungi Hatta di rumah kediamannya untuk mengetahui suasana dan merundingkan rencana perjuangan. Dalam pertemuan itu, Soekarno dan Hatta mengikat janji setia untuk bekerja sama demi usaha mencapai kemerdekaan. Itulah saat terbentuknya *dwi tunggal* Soekarno-Hatta, kesatuan dua tokoh politik pimpinan nasional. Pada hakikatnya, kedua tokoh pimpinan nasional itu mempunyai watak pembawaan yang bertentangan. Pertentangan watak itu tampak jelas pada tahun 30-an, pada saat pembentukan Pendidikan Nasional Indonesia di bawah pimpinan Hatta dan Syahrir, dan pembentukan Partindo (Partai Nasional Indonesia) di bawah pimpinan Sartono dan Soekarno. Soekarno adalah seorang idealis-intelektual yang berjiwa seniman. Wataknya sangat emosional, hatinya mudah tergerak menurut emosinya. Kata-katanya bernyala-nyala membakar hati. Ia pandai mencari pengikut dan senang terhadap massa-aksi. Ia cinta keindahan dan rindu kemegahan. Sebaliknya, Hatta adalah seorang realis-intelektual, berjiwa filsuf. Segala tindakannya serba diperhitungkan dengan teliti. Ia melihat kenyataan-kenyataan dalam masyarakat, termasuk kelemahan-kelemahan bangsa Indonesia. Untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu, diperlukan pendidikan. Oleh karena itu, usahanya dipusatkan pada penggalangan kader dalam pergerakannya. Kata-katanya serba sederhana, penuh berisi, tetapi kering, namun menarik perhatian orang. Ucapannya bersifat mengajak pendengarnya berpikir. Itulah pembawaan seorang filsuf yang bergerak mencari kebenaran dalam bidang politik. Ia kurang memerhatikan bahwa pada hakikatnya politik adalah kekuasaan,

bukan semata-mata kebenaran berpikir. Kebenaran berpikir dalam bidang politik demi suksesnya, harus dilandasi kekuatan dan kekuasaan. Yang menjadi faktor pengikat dwitunggal Soekarno-Hatta adalah kesamaan cita-cita politik untuk mencapai kemerdekaan tanah air. Untuk tujuan itu, keduanya sanggup memberikan pengorbanan apa pun. Demikianlah, demi tercapainya kemerdekaan, mereka berdua sanggup melupakan watak pembawaan mereka yang bertentangan. Perselisihan paham di masa lampau perlu dilupakan. Perbedaan pandangan dan tindakan akibat perbedaan watak tentang soal-soal yang sedang dihadapi dan yang akan datang, dihindari sejauh mungkin. Sutan Syahrir yang juga hadir dalam pertemuan itu, sanggup menyusun gerakan di bawah tanah. Hatta dan Soekarno akan bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang secara terang-terangan.

Hari berikutnya Soekarno menghadap panglima tertinggi di Jawa, Jenderal Imamura, di istana. Soekarno berbahasa Indonesia, Imamura berbahasa Jepang. Percakapan berlangsung melalui juru bahasa. Soekarno menanyakan apa rencana pemerintah militer Jepang mengenai Indonesia. Pertanyaan itu dijawab bahwa Jenderal Imamura sebagai panglima tertinggi hanya mengemban perintah Kaisar Tenno Heika. Segala perintah datang dari Kaisar Tenno Heika, sebagai pemegang kuasa yang tertinggi, untuk dilaksanakan. Apakah Indonesia akan memperoleh status negara merdeka penuh, atau hanya akan diberi status negara bagian dalam lingkungan federasi di bawah lindungan Jepang, itu semuanya bergantung pada keputusan pemerintah tertinggi di Tokyo. Keputusan Kaisar tentang status Indonesia kelak kemudian hari tidak akan disampaikan sebelum perang berakhir. Selanjutnya, Soekarno mengucapkan syukur atas kejayaan Jepang mengusir kaum penjajah Belanda dan menanyakan berapa lama kiranya pemerintah militer Jepang akan berlangsung di Indonesia. Pertanyaan itu dijawab bahwa belum ada rencana tentang hal tersebut. Soekarno mengajukan saran agar orang-orang sipil Indonesia diizinkan ikut mengambil bagian dalam pemerintahan demi suksesnya pemerintahan pendudukan karena hanya orang-orang

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Indonesialah yang benar-benar mengetahui seluk-beluk daerah dan keinginan rakyatnya. Saran itu diterima baik dengan janji bahwa jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan akan diserahkan kepada orang-orang Indonesia agar dapat ikut melancarkan jalannya pemerintahan.

Pada tanggal 5 Maret 1942, ketika kabar pendaratan tentara Jepang di Banten telah tersiar, pemerintah Hindia Belanda terburu-buru mencetak surat selebaran yang menyatakan bahwa kota Jakarta adalah kota terbuka dan akan menerima tentara Jepang utusan Tenno Heika, dengan harapan kota Jakarta dapat diselamatkan dari serangan tentara Jepang, dari laut, darat, dan udara. Demikianlah, kota Jakarta telah memberikan isyarat “menyerah” sebelum diserbu. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Bandung, tanpa memberi tahu panglima tertinggi sekutu yang ada di Jawa, padahal tentara Amerika dan Australia yang ditempatkan di Jawa, sanggup memertahankan Pulau Jawa. Pada permulaan Maret, serah terima resmi kota Jakarta dari pemerintah Belanda kepada tentara Jepang dilangsungkan di gedung karesidenan Jakarta, dihadiri oleh ribuan rakyat. Di bawah tilikan mata ribuan rakyat, pemerintah Belanda memamerkan ketidakmampuannya memertahankan wilayah jajahannya terhadap serangan tentara Jepang. Rakyat Indonesia mengira bahwa tentara Jepang dengan tulus ikhlas membantu bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari rangkulan penjajahan sesuai dengan seruan-seruannya melalui radio. Oleh karena itu, rakyat berbondong-bondong menyambut kedatangan tentara Jepang dengan lambaian dan kibaran bendera merah putih dan teriakan merdeka. Di berbagai tempat, berkibar bendera merah putih dan terdengar alunan lagu Indonesia Raya.

Pengibaran bendera merah putih dan nyanyian lagu Indonesia Raya dibiarkan saja untuk merebut simpati bangsa Indonesia. Bahkan, jika bertemu dengan orang Indonesia, tentara Jepang meneriakkan semboyan Indonesia-Jepang sama-sama dan memperkenalkan dirinya sebagai “saudara tua”. Dalam sekejap mata, tertumpah simpati bangsa Indonesia kepada tentara Jepang yang bertindak seolah-olah menjadi

pembebas bangsa Indonesia demi kepentingan bangsa Indonesia semata-mata. Setelah semangat bangsa Indonesia yang meluap-luap itu mulai reda dan jumlah tentara Dai Nippon makin bertambah sehingga dapat mulai mengatur pemerintahan, semangat rakyat mulai disalurkan ke arah kepentingan bala tentara pendudukan Jepang. Pengibaran bendera merah putih dan nyanyian lagu Indonesia Raya mulai dilarang, diganti dengan pengibaran bendera Jepang *Hi No Manu* dan nyanyian *Kimi Gayo*. Tipu muslihat Jepang mulai kelihatan dan simpati rakyat mulai berkurang.

Radio disegel agar rakyat tidak dapat mendengarkan siaran sekutu, dan hanya mendengarkan siaran berita resmi dari pemerintah militer Jepang. Surat kabar dilarang terbit, menunggu penertiban pemerintah. Mulut dan telinga rakyat seolah-olah disumbat. Pada saat itu, rakyat mulai kecewa. Dikiranya hari akan panas sampai petang, kiranya hujan tengah hari. Rakyat mengira lepas dari cengkeraman macan, ternyata terjerumus ke dalam mulut buaya yang tidak kalah ganas dan buasnya. Sorak gembira pada waktu pendaratan tentara Jepang, yang dikira membawakan kemerdekaan, terlalu cepat berubah menjadi ratap tangis di bawah tindasan dan kerja paksa.

2. Politik Penjajahan Jepang

Dalam bidang politik, tindakan pertama kali yang dilakukan pihak Jepang adalah pembekuan segala kegiatan politik. Semua pergerakan rakyat yang berhaluan politik dilarang. Pemerintah militer Jepang menerapkan sistem fasisme dan menetapkan garis politik pemerintah sebagai satu-satunya aliran yang harus ditaati. Rakyat tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kemenangan gemilang yang diperoleh tentara Jepang dalam waktu yang sangat singkat, memang menakjubkan, menimbulkan kepercayaan orang terhadap keunggulan dan kemampuan tentara Jepang dan meningkatkan martabat Jepang pada taraf yang sangat tinggi. Keunggulannya merupakan faktor yang menentukan kepemimpinan Jepang di antara bangsa Asia. Selain itu, adalah suatu kenyataan yang

tidak dapat dimungkiri bahwa bala tentara Jepang berhasil mengusir kaum imperialis Barat yang telah berabad-abad bercokol di berbagai negara di Asia dan membebaskan rakyat jajahan dari belenggu kaum imperialis. Pada hakikatnya, rakyat jajahan hanya berganti tuan karena mereka masih tetap meringkuk di bawah kaki kaum penjajah. Pihak Jepang percaya bahwa di Asia telah terbit cahaya yang menyilaukan dan cahaya itu adalah Jepang. Demikianlah, bala tentara pendudukan Jepang melancarkan Gerakan Tiga A sebagai doktrin politik penjajahannya, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Di Indonesia, Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mr. Sjamsuddin. Meskipun demikian, Mr. Sjamsuddin bukan tokoh politik yang berkaliber besar. Ia belum mendapat kepercayaan rakyat dan tidak mampu mengikat hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Tiga A tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh bala tentara pendudukan. Bertalian dengan kedatangan Soekarno dari Sumatra, Gerakan Tiga A dibubarkan pada bulan November 1942. Pada permulaan Maret 1943, bala tentara pendudukan mengumumkan berdirinya badan baru di bawah pimpinan tokoh-tokoh nasional yang telah mendapat kepercayaan rakyat. Badan baru itu adalah "Putera," singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh empat serangkai: Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kiai H: Mas Mansur. Soekarno sebagai ketua "Putera" harus sering memerengarkan suaranya dan memerlihatkan dirinya di muka rakyat yang akan dikerahkan demi kepentingan bala tentara pendudukan dalam melancarkan perang sucinya. Demikianlah, pada akhir tahun 1942, sebelum pembentukan "Putera", Soekarno untuk pertama kalinya, setelah dibebaskan dari pengasingan, memerengarkan suaranya melalui corong radio Jakarta. Pidatonya sangat singkat, hanya memakan waktu beberapa menit saja, hanya sekadar untuk memenuhi keinginan rakyat yang telah lama merindukan suaranya.

Maksud pemerintah militer Jepang mendirikan Putera adalah untuk menyelenggarakan "Kemakmuran Asia Timur Raya" di bawah pimpinan Jepang dan mengerahkan tenaga rakyat untuk kepentingan

perang demi kemenangan pihak Jepang. Gerakan Putera hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura karena pada waktu itu wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga daerah pendudukan. Sumatra menjadi daerah pendudukan tentara Jepang ketujuh, bergabung dengan Singapura, yang disebut *Syonanto*. Markas besarnya ada di Singapura. Jawa dan Madura menjadi daerah pendudukan tentara Jepang yang keenam belas, markas besarnya ada di Jakarta. Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil menjadi daerah pendudukan Angkatan Laut Jepang yang bermarkas di Makassar. Keinginan Soekarno untuk menyebarkan semangat nasionalisme melalui Putera diperkuat dengan siaran radio Tokyo yang memuat anjuran Perdana Menteri Tojo, agar bangsa Indonesia ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Dan kunjungan perdana menteri itu ke Jakarta dilakukan dalam bulan Juni 1943. Oleh karena itu, Soekarno beranggapan bahwa Putera adalah jembatan yang akan menghubungkan Indonesia dengan pemerintahan sendiri alias kemerdekaan. Dari segala penjuru dan golongan, Putera mendapat sambutan meriah. Kepercayaan bangsa Indonesia terhadap maksud baik pihak Jepang bertambah tebal dengan pengangkatan Soekarno sebagai ketua Badan Penasihat Pusat pada bulan September 1943 dan kunjungannya ke Tokyo bersama Ki Bagus Hadikusumo dan Hatta pada tanggal 10 November 1943, untuk menyatakan terima kasih bangsa Indonesia kepada Tenno Heika atas kesediaannya memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan. Ikut sertanya Hatta ke Tokyo merupakan suatu problem bagi pemerintah militer Jepang di Jawa karena hubungan Hatta dengan gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Syahrir. Berbeda dengan Soekarno, Hatta jarang berbicara dalam rapat samudra; perhatiannya dicurahkan pada pemupukan kader nasionalis. Sikap Hatta itu menimbulkan kecurigaan pihak Jepang. Pihak pemerintah tidak berani bertindak keras terhadap Hatta, takut kalau-kalau tindakan keras terhadapnya akan meretakkan hubungan antara bala tentara Jepang dan para pemimpin Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang memberikan saran agar Hatta ditahan di Tokyo, jangan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

permulaan abad ke-20. Soekarno dan Gatot Mangkupradja disertai memilih opsir-opsir Peta angkatan pertama yang akan memasuki pendidikan militer berkat pengaruhnya kepada para pembesar Jepang. Baik Soekarno maupun Gatot Mangkupradja berhasil meyakinkan pihak Jepang bahwa para opsir Peta harus mempunyai landasan pengetahuan politik dan kesadaran nasional di samping pengetahuan strategi dan latihan militer karena, menurut mereka, landasan kesadaran nasional adalah syarat utama bagi para opsir untuk memertahankan tanah air. Soekarno dan Gatot Mangkupradja diberi izin istimewa untuk memberikan gemblengan nasionalisme kepada para opsir Peta angkatan pertama di kota Jakarta, yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa dan Madura. Pada waktu itu, tentara Jepang sudah mulai merosot prestasinya di berbagai front, mereka khawatir kalau-kalau pihak sekutu akan menyerang Jawa dan Madura. Oleh karena itu, mereka mempropagandakan pembentukan prajurit pembela tanah air. Beratus-ratus kaum terpelajar Indonesia mencatatkan diri untuk diterima sebagai prajurit pembela tanah air. Mereka yang diterima, dalam waktu singkat disiapkan untuk menjalani latihan-latihan militer dari opsir-opsir Jepang di kota masing-masing. Mereka dikumpulkan dalam asrama-asrama khusus yang disebut *daidan*, dipimpin oleh seorang *daidanco*. Hampir di tiap kota di Jawa ada *daidan* untuk prajurit pembela tanah air. Oleh karena itu, jumlahnya kurang lebih tiga belas ribu pada akhir tahun 1944.

Pada pertengahan tahun 1943, pihak Jepang juga mempropagandakan pembentukan prajurit pembantu bala tentara Dai Nippon, yang disebut *heiho*. Banyak pemuda dari desa yang dianjurkan oleh para pamong praja untuk menjadi *heiho*. Mereka dikirim ke garis depan dan berjuang bersama-sama tentara Jepang. Baik Peta maupun *heiho* adalah tenaga vital dalam pertahanan. Mereka itulah yang kemudian akan menjadi inti tentara Republik Indonesia, setelah Jepang tidak lagi berkuasa. Dalam soal kemiliteran, sesungguhnya hampir segenap rakyat Indonesia telah dipersiapkan oleh Jepang demi kepentingan pertahanan. Murid-murid sekolah

dari sekolah menengah pertama sampai sekolah tinggi, mendapat didikan militer sebagai mata pelajaran utama. Dengan senang hati, mereka mengikuti latihan-latihan militer yang diberikan oleh opsir-opsir Jepang di sekolahnya masing-masing. Sudah sejak pertengahan tahun 1942, para kepala sekolah secara bergiliran mendapat indoktrinasi yang harus disalurkan kepada murid-murid. Mereka dikumpulkan di bekas sekolah *Kweekschool* di Leonie laan, untuk dididik selama tiga bulan. Yang diajarkan adalah bahasa Jepang, semangat Jepang, dan *taiso* atau gerak badan. Berkat adanya latihan guru di Leonie laan dan adanya sekolah gerak badan di Pegangsaan Timur 17, semangat Jepang dan didikan militer tersebar sangat pesat di kalangan murid-murid sekolah. Latihan gerak badan yang dilandasi dengan semangat Jepang mengubah sifat pendidikan Belanda yang sangat mengutamakan pengetahuan menjadi sekolah setengah militer. Tahun 1943, di kota-kota didirikan organisasi *gakutotai*, khusus untuk murid-murid sekolah yang menyebarkan semangat anti-sekutu dan pro-Jepang, menyelenggarakan latihan militer di bawah pengawasan kepala-kepala sekolah. Yang dapat diterima sebagai anggota adalah pelajar-pelajar sekolah menengah.

Di kalangan Islam, pihak pemerintah Jepang mempropagandakan kesatuan orang-orang Islam tanpa pandang aliran untuk melawan sekutu, yang dianggap sebagai musuh agama Islam di Indonesia. Propaganda itu tidak banyak hasilnya karena orang-orang muslim menganggap orang-orang Jepang sebagai orang kafir yang menyembah Tenno Heika, seperti layaknya menyembah kepada Allah. Mereka enggan untuk berkiblat ke Tokyo sambil membungkuk, memberikan hormat kepada Tenno Heika yang disebut *seikeire* karena mereka sudah biasa berkiblat ke Makah. Setiap kali pada akhir upacara, hadirin diharuskan melakukan *seikeirei*. Melakukan *seikeirei* merupakan keberatan prinsipil bagi kaum muslim.

Tenaga perempuan juga tidak boleh ketinggalan untuk memberikan bantuan kepada bala tentara Dai Nippon. Dalam masa pendudukan itu, hanya ada satu perkumpulan kaum perempuan. Perkumpulan perempuan tunggal itu bernama *Fujinkai*, didirikan

berkat usaha *sendenbu* dalam tugasnya untuk memperkuat dan menggiatkan pertahanan. Susunan Fujinkai dari atas ke bawah. Maksudnya adalah bahwa pembentukan perkumpulan Fujinkai tidak didasarkan atas kemauan kaum perempuan, tetapi atas perintah dari atas. Mau tidak mau, cakap tidak cakap, semua istri para pembesar dan pemangku jabatan penting, terutama istri pamong praja, harus menjadi anggota Fujinkai dan bekerja demi kepentingan pertahanan. Pengumpulan harta kekayaan berupa emas dan intan sebagai sumbangan wajib penduduk untuk dana perang, penanaman jarak, dan pengerahan tenaga romusa dilakukan oleh para pembesar dengan bantuan istrinya, di bawah pengawasan Jepang. Demi keselamatan pribadi dan keselamatan suaminya, para perempuan Fujinkai bekerja tanpa protes.

Dalam bidang produksi, petani dianjurkan meningkatkan pangan demi kepentingan bala tentara Dai Nippon. Pada musim panen, padi petani dijual kepada pemerintah dengan harga yang sangat murah, dikumpulkan di tempat-tempat tertentu. Karena organisasi pemerintah dalam bidang pengerahan pangan itu sangat rapi, tidak ada petani yang bisa lolos. Lagi pula, ancaman hukuman terhadap pelanggaran wajib serah hasil bumi terlalu berat. Kecuali pamong praja, *tonari gunico* dan *seinendan* ikut campur dalam pengumpulan hasil bumi petani. Petani hanya mempunyai hak untuk menggarap sawah, namun tidak mempunyai hak untuk memungut dan menikmati hasil kerjanya. Meskipun tanah perkebunan telah banyak yang diubah menjadi ladang jagung untuk menambah hasil pangan, persediaan makan bagi rakyat sama sekali tidak mencukupi. Sebagian besar dari rakyat desa, yang semula hidup dari hasil perburuhan di perkebunan, menjadi pengangguran. Penduduk kota kelaparan karena beras cadangan yang hanya seratus lima puluh gram sehari untuk setiap orang, tidak mencukupi. Oleh karena itu, timbul bahaya kelaparan di berbagai tempat. Banyak orang mati kelaparan di tepi jalan. Rakyat gelandangan yang badannya kurus kering hanya berpakaian goni setengah telanjang, berkeliaran mencari pakaian di tempat-tempat pembuangan sampah. Padi yang bertimbun-timbun



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Jepang. Rentetan pemberontakan bermunculan baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dalam bulan Februari 1944, meletus pemberontakan di Singapura di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Dua bulan kemudian, menyusul pemberontakan rakyat di Indramayu di distrik Karangampel. Dalam bulan November, meletus pemberontakan Peta di Aceh, di bawah pimpinan Teuku Hamid dari Meureudu. Dua peleton Peta melarikan diri ke gunung. Pihak Jepang mengambil tindakan, menawan keluarga-keluarga yang ditinggalkan dengan ancaman akan dibunuh jika Teuku Hamid dan kawan-kawannya tidak turun. Karena ancaman itu, Teuku Hamid menyerah. Di Banjarmasin, timbul pemberontakan kaum terpelajar yang diselenggarakan oleh Parindra. Pemberontakan ini menelan korban lebih dari enam belas ribu orang, dibunuh secara kejam oleh pihak Jepang. Pada tahun 1943, terjadi pemberontakan di Biak, yang menelan korban sebanyak delapan ratus orang. Pemberontakan merambat dari pantai Irian Barat ke pedalaman di Serui Nimrod di bawah pimpinan S. Pare-pare. Pada tanggal 14 Februari 1944, meletus pemberontakan Peta di Daidan, Blitar, di bawah pimpinan Syodanco Supriyadi. Untuk menghadapi pemberontakan itu, pihak Jepang terpaksa mengerahkan tenaga militer lebih kurang satu batalyon beserta pasukan-pasukan berlapis baja. Banyak opsir Peta yang mati terbunuh dan ditawan. Supriyadi berhasil lolos, hilang sampai sekarang, dan menjadi tokoh misterius yang tidak diketahui ke mana perginya dan di mana kuburannya. Pemberontakan Peta di Blitar menjadi pangkal sengketa antara pihak Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang yang saling bersaing. Pihak Angkatan Laut menyalahkan Angkatan Darat yang menguasai Jawa dan Madura, dan menganggap bahwa pemberontakan itu adalah akibat logis dari politik pendudukan dan tindakan-tindakan para anggota Angkatan Darat. Sikap Angkatan Darat Jepang yang menunjukkan keangkuhan sikap dan kebengisan tindakan, mudah menempeleng yang menimbulkan kebencian rakyat. Kebengisan dan kekejamannya memang ditakuti rakyat, namun memerosotkan martabatnya karena mereka dianggap sebagai biadab. Kebengisan dan kekejaman mereka

pada hakikatnya adalah manifestasi kekecewaan karena di berbagai front, tentara Jepang terdesak. Berita tentang gugurnya Jenderal Jepang satu demi satu memerosotkan kepercayaan rakyat terhadap kekuatan tentara Jepang yang diagung-agungkan pada awal perang Pasifik. Rakyat menduga bahwa tentara Jepang akan membawakan kemerdekaan dan kesejahteraan, namun yang terjadi adalah penindasan dan penderitaan. Rakyat yang tertipu kini kehilangan kepercayaan.

4. Janji Kemerdekaan

Di Pasifik, kekuatan Angkatan Laut Jepang dipusatkan di Pulau Truk, di Kepulauan Carolina. Meskipun Angkatan Laut Amerika berhasil merebut pangkalan-pangkalan lain di sekitar Pulau Truk, seperti di Tarawa pada tanggal 1 November 1943, kemudian Kwajelin di Kepulauan Marshall pada tanggal 31 Januari 1944, Pulau Truk tetap dibiarkan saja karena pertahanan Jepang di sana sangat kuat. Admiral Nimitz bermaksud mengepung Pulau Truk dan memutuskan hubungannya dengan negara induk Jepang. Untuk tujuan itu, ia mendaratkan tentara di Pulau Saipan tanggal 14 Juni 1944, letaknya di Kepulauan Mariana, sebelah utara Kepulauan Carolina. Pulau Saipan dipertahankan mati-matian oleh tentara Jepang, yang berpendirian lebih baik mati daripada menyerah. Pertempuran menjalar ke Pulau Guam dan Tinian. Angkatan Laut Jepang yang datang membantunya, terpaksa mundur akibat serangan bertubi-tubi dari Angkatan Udara Amerika. Dalam perebutan pangkalan di Kepulauan Mariana, di pihak Amerika gugur dua puluh lima ribu orang dan di pihak Jepang empat puluh empat ribu orang. Kepulauan Mariana berhasil diduduki tentara Amerika dan dijadikan pangkalan utama untuk menyerbu Tokyo, yang letaknya hanya 2200 km dari kepulauan Mariana. Dalam bulan September 1944, Angkatan Laut Amerika berhasil merebut Pulau Palau, yang letaknya di antara Filipina dan Truk sehingga pangkalan laut Jepang di Truk terputus hubungannya dengan pangkalan laut Jepang di Pulau Leyte, Filipina.

Dari Pulau Palau dan Kepulauan Mariana, pangkalan laut Jepang di Pulau Truk diserang dengan kapal terbang hingga menyerah. Dengan jatuhnya pangkalan laut Truk, kekuatan Jepang di Pasifik patah.

Patahnya kekuatan Jepang di Pasifik menyebabkan bala tentara pendudukan Jepang di Jawa pada tanggal 7 September mengumumkan secara resmi bahwa bala tentara Dai Nippon berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Bertalian dengan pengumuman itu, dibentuklah Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI), yang disebut Dokuritu Jumbi Cosakai. Maksudnya adalah mengajak bangsa Indonesia memertahankan Jawa dan Madura terhadap serangan pihak sekutu karena bala tentara pendudukan ingin bertahan di sini seandainya terputus hubungannya dengan negara induknya. Meskipun demikian, janji itu ditafsirkan oleh para pemimpin Indonesia sebagai kemurahan hati bala tentara Jepang dan sekaligus terealisasi janjinya pada awal masa pendudukan.

BPPKI beranggotakan 60 orang, diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, diberi tugas untuk merancang Undang-Undang Dasar. BPPKI mengadakan sidang dua kali saja, yakni dari tanggal 29 Mei-1 Juni dan dari tanggal 10-16 Juli 1945. Pada hari terakhir persidangan pertama, BPPKI menerima secara bulat perumusan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdulkahar Muzakkir, Agus Salim, Ahmad Subardjo, Wachid Hasdjim, dan Muh. Yamin membuat naskah ilegal yang merupakan balasan terhadap siasat Jepang dengan pembentukan BPPKI. Naskah itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta, disusun pada tanggal 22 Juni 1945, seperti berikut ini:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa meng-

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

antarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam Piagam Jakarta di atas, sama sekali tidak disebut pemerintah bala tentara Jepang yang menghadiahi kemerdekaan. Yang dikehendaki oleh pemerintah bala tentara Jepang adalah perumusan yang akan dikemukakan oleh BPPKI di mana disebutkan peranan pemerintah bala tentara Jepang. Karena Piagam Jakarta disusun di luar pengetahuan bala tentara pendudukan Jepang, naskah itu disebut ilegal. Lagi pula, isinya bertentangan dengan maksud pemerintah bala tentara Jepang.

BPPKI dalam sidangnya yang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk tujuan itu, dibentuk tiga panitia:

1. Panitia Perancang UUD, diketuai oleh Soekarno,
2. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso, dan,
3. Panitia Keuangan dan Perekonomian, diketuai oleh Hatta.

Panitia Perancang UUD terdiri dari 19 orang, yaitu Soekarno, Maramis, Otto Iskandar Dinata, Purbojo, Agus Salim, Subardjo,

Supomo, Maria Ulfah, Santoso, Wahid Hasyim, Parada Harahap, Latuharhary, Susanto Tirtoprodjo, Sartono, Wongsonegoro, Wurjaningrat, Singgih, Tan Eng Hoat, Husein Djajadiningrat, dan Sukiman.

Panitia UUD lalu membentuk panitia kerja yang terdiri dari tujuh orang: Supomo, Wongsonegoro, Subardjo, Maramis, Singgih, Agus Salim, dan Sukiman. Panitia ini disertai tugas untuk menyiapkan rencana UUD. Setelah rencana UUD selesai dibahas, kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari tiga orang: Supomo, Agus Salim, dan Husein Djajadiningrat. Setelah itu, rancangan UUD dilaporkan pada sidang lengkap yang diadakan pada tanggal 14 Juli 1945. Rapat berlangsung sampai tanggal 16 Juli dan mengesahkan rancangan UUD.

Penyelenggaraan sidang BPPKI pada akhir bulan Mei dan pada pertengahan bulan Juli itu mempunyai hubungan erat dengan jalannya Perang Asia Timur Raya. Dalam bulan Mei 1945, tentara Amerika berhasil mengusir tentara Jepang dari sumber minyak Tarakan di Kalimantan. Pendudukan Tarakan oleh tentara Australia sangat membahayakan kedudukan bala tentara pendudukan Jepang di Jawa dan Madura. Lagi pula, dalam bulan Mei itu juga perang di Eropa berhenti sehingga pihak sekutu dapat bersiap-siap memindahkan tentaranya ke wilayah Pasifik. Setelah tentara Amerika mendarat di Pulau Iwojima bulan Februari, yang dipertahankan mati-matian oleh tentara Jepang selama dua puluh enam hari, negara induk Jepang setiap saat dapat diserang oleh kapal terbang Amerika. Dalam pertempuran sengit di Pulau Iwojima, pihak Jepang kehilangan dua puluh ribu orang. Dua minggu kemudian, tentara Amerika mendarat di Pulau Okinawa di sebelah selatan Jepang, dikawal 1400 kapal perang. Okinawa dipertahankan selama delapan puluh dua hari, baru menyerah pada tanggal 21 Juni 1945. Kerugian pihak Amerika dalam usaha menduduki Okinawa adalah berupa berpuluh-puluh perahu besar-kecil akibat barisan berani mati Kamikaze Jepang. Dengan jatuhnya Okinawa, tentara Jepang tidak berdaya lagi, tetapi segan menyerah. Meskipun pada tanggal 26 Juli pihak sekutu di Postdam

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

mengeluarkan seruan agar pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat, pihak Jepang segan menyerah. Para pemimpinnya mendekati Rusia agar mengusahakan perjanjian perdamaian dengan pihak sekutu yang menguntungkan. Rusia pada waktu itu belum menceburkan diri dalam Perang Asia Timur Raya, tetapi telah siap-siap untuk bergabung dengan sekutu. Harapan Jepang agar Rusia bergabung dengan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, ternyata sia-sia belaka. Bagi tentara pendudukan Jepang yang ingin bertahan di daerah pendudukannya masing-masing, tidak ada jalan lain selain mengambil hati penduduk untuk bersama-sama memertahankan wilayahnya.

Pekerjaan BPPKI dilaporkan kepada Jenderal Terauci yang memegang pucuk pimpinan bala tentara Dai Nippon di wilayah selatan yang disebut Nampoo Gun, bermarkas besar di Saigon. Persoalan kemerdekaan telah maju selangkah dan meningkat ke arah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang disetujui oleh Jenderal Terauci. Dalam pidatonya tanggal 7 Agustus 1945, Gunseikan menegaskan bahwa pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan yang disebut Dokuritsu Jumbi Inikai, dimaksudkan untuk menebus janji Dai Nippon untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari, yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944.

Mendengar ucapan itu Soekarno berjanji akan segera membentuk panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang tidak lama lagi akan bersidang. Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil seluruh Indonesia, yang diangkat oleh pucuk pimpinan Dai Nippon di wilayah selatan. Tempat bersidang ditetapkan di Jawa. BPPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945. Untuk memenuhi undangan Jenderal Terauci, ditetapkan di pangkalan selatan pada tanggal 11 Agustus pukul 12 siang dengan acara upacara pemberitahuan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia Oleh Nampoo Gun Saikoo Sikikan kepada wakil bangsa Indonesia.

Pada tanggal 12 Agustus, rombongan kembali ke Indonesia dan sampai di tanah air pada tanggal 14 Agustus pukul 1.15 siang.

Sekembalinya dari Saigon, Soekarno memberi keterangan seperti berikut ini: 1) kemerdekaan yang akan diberikan oleh Dai Nippon memang memuat syarat-syarat, 2) selama perang, negara Indonesia akan tetap dipimpin oleh bala tentara Dai Nippon. Hatta menambahkan, yaitu: 1) Di Malaya mereka berjumpa dengan Letnan Kolonel Ismail Jaqob dan Dokter Gaos Mahjudi, 2) Rakyat Malaya ingin bersatu dengan negara Indonesia. Keterangan Hatta itu cocok dengan keterangan Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 di gedung kebudayaan, yaitu: "Pada tanggal 9 Agustus, kami, Soekarno-Hatta, pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besa Terauci. Kembali ke Indonesia membawa tiga 'cap,' yaitu 1) Soekarno diangkat sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan Hatta sebagai wakil ketua, 2) Panitia Persiapan Kemerdekaan boleh mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945, dan 3) Cepat atau tidaknya pekerjaan, diserahkan seluruhnya kepada panitia.

Pada tanggal 14 Agustus, pemerintah Dai Nippon mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai berikut:

1. Tuan-tuan Soekarno, Hatta, dan Radjiman yang telah diundang oleh Nanpoo Gun Saiko Sisikan untuk mengadakan pembicaraan tentang pembentukan PPKI pada tanggal 14 bulan 8 ini, tiba kembali di Jakarta sesudah menyelesaikan pembicaraan tentang hal-hal pokok asas kemerdekaan dan PPKI itu,
2. Nama-nama anggota PPKI itu seperti berikut: 1. Ketua: Soekarno, 2. Wakil ketua: Moh. Hatta. Anggota-anggota dari Jawa: Radjiman, Otto Iskandar Dinata, Hadi Kusumo, Wachid Hasim, Surjohamijoyo, Purboyo, Sutaryo, Suroso, Supomo, Abdulkadir, Yap Tjan Bing. Anggota-anggota dari Sumatra: Moh. Amir, Teuku Moh. Hasan, Abdul Abas. Anggota-anggota dari daerah Angkatan Laut: Ratulangi, Andi Pangeran, A.A Hamidhan, I Gusti Ketut Puja, dan Latuharhari,
3. Nama-nama tenaga Zimokyoku Panitia Persiapan Kemerdekaan itu adalah: Zimokyokuco: Drs. Moh. Hatta. Zimokyokuco Sanyo: Mr. Subarjo, dan

4. Pada tanggal 18 bulan ini, semua anggota harus sudah berkumpul dan hari persidangan pertama adalah keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus.

Sesampainya di lapangan terbang kemayoran, Soekarno-Hatta memberikan keterangan kepada semua orang yang datang menjemputnya bahwa kepergian mereka ke Saigon adalah untuk menemui Jenderal Teraucci, bertujuan untuk menerima penjelasan janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Ditambahkan juga bahwa soal kemerdekaan itu hanya menunggu saatnya saja, sewaktu-waktu kita dapat merdeka.

“Kalau dahulu saya katakan, sebelum sebelum jagung berbuah, Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Soalnya hanya bergantung kepada saya dan kemauan rakyat membaharui tekadnya meneruskan perang suci Dai tua ini.”

5. Gerakan Bawah Tanah

Sesuai dengan janjinya kepada Van der Plass, Amir Syarifuddin segera mulai menyusun gerakan bawah tanah ketika tentara Jepang mendarat, yang diikuti oleh penyerahan tentara Belanda. Pemimpin nasional yang didekati oleh Amir Syarifuddin adalah Dokter Cipto Mangunkusumo, yang baru saja pulang dari pengasingan dan menetap di kota Sukabumi. Di rumah Dokter Cipto, Amir Syarifuddin mengadakan rapat dengan rekan-rekannya, Joko Suyono, Mr. Hendromartono, dan dokter Ismail. Dalam pertemuan itu, diperoleh kesepakatan untuk membentuk gerakan anti-fasis yang akan dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Pramuji, dan Sukayat. Ketiganya adalah tokoh komunis muda. Dokter Cipto diangkat sebagai penasihat.

Tentara pendudukan Jepang mengambil alih aparatur pemerintah Belanda yang terdiri dari bangsa Indonesia. Orang-orang yang bekerja sebagai mata-mata dan tergabung dalam PID, juga ikut diambil alih untuk membantu kelancaran pemerintahan baru. Polisi

rahasia itu tahu, siapa saja yang dicurigai oleh pemerintah Belanda. Itulah sebabnya, gerakan anti-fasis yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, segera tercium oleh pihak Jepang. Pemerintah militer Jepang memperoleh keterangan yang agak jelas dari polisi rahasia itu tentang aliran-aliran yang masih ada di masyarakat Indonesia. Pada permulaan bulan September 1942, penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai, mulai dilakukan. Jaring-jaring yang dipasang oleh gerakan anti-fasis terbongkar. Dalam bulan Februari 1943, Amir Syarifuddin bersama 300 pengikutnya ditangkap. Para pimpinannya dijatuhi hukuman mati, termasuk Amir Syarifuddin, Pramuji, Sukayat, Abdurrakhim, dan Abdul Aziz, pada tanggal 29 Februari 1944, setelah ditahan selama satu tahun. Dalam tahanan, Amir Syarifuddin disiksa di luar perikemanusiaan, kemudian dibuang ke penjara Cipinang. Badannya kurus, kering, dan tinggal tulang semata. Keputusan pengadilan militer itu didengar oleh Dr. T. Gunung Mulia, yang pada waktu itu menjadi pembesar di Bunkakyoku (Kementerian Pengajaran) dan juga berasal dari Tapanuli, seperti halnya Amir Syarifuddin. Segera Gunung Mulia memberi tahu Hatta. Akhirnya, secara beranting berita itu sampai kepada Soekarno. Demi keselamatan Amir Syarifuddin, Hatta dan Soekarno menemui Jenderal Nagano, Panglima tertinggi Jepang di Jawa. Dengan tegas Soekarno meminta agar Amir Syarifuddin dibebaskan. Jika permintaan itu ditolak, pihak Jepang tidak usah mengharapkan kerja sama dengan Soekarno. Berkat gertak Soekarno, keputusan hukuman mati berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan tawanan-tawanan lain tetap menjalani hukuman mati.

Selama zaman pendudukan Jepang, Sutan Syahrir mengambil sikap non-kooperatif. Sikap itu sesuai dengan pendiriannya sebagai seorang marxis, seperti dinyatakan dalam renungan Indonesia, 25 Maret 1938. Ia menandakan bahwa berhubungan dengan perubahan situasi dunia, ia meninjau kembali haluan gerakan rakyat. Ia menganjurkan kerja sama antara gerakan nasional dan pemerintah kolonial Belanda atas dasar saling mengerti, saling menghormati, dan saling menghargai untuk dapat menanggulangi bahaya dari luar

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

yang mengancam kedua bangsa yang bersangkutan. Pendudukan bala tentara Dai Nippon adalah suatu bahaya yang disinyalir sebagai bahaya yang mengancam pemerintah Belanda dan rakyat Indonesia. Nasionalisme yang merupakan manifestasi kompleks inferior terhadap kaum penjajah, dan sikap non-kooperatif demi kepentingan bersama, ditinggalkan. Demi pembasmian nazisme Jerman dan fasisme Jepang, Syahrir bersimpati kepada sekutu. Mungkin demi pertimbangan atas keselamatan, Sutan Syahrir, menurut Adam Malik, terpaksa mengadakan kerja sama semu dengan pihak Jepang dengan jalan memberikan pelajaran pada salah satu Asrama Dinas Rahasia Jepang di jalan Defentielijin van de Bosch. Meskipun demikian, sebagai tokoh politik terkemuka, selama zaman kependudukan bala tentara Jepang, tidak pernah terdengar suaranya dan juga tidak pernah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Perhatiannya dicurahkan ke dalam pendidikan kader secara diam-diam. Hanya beberapa orang saja yang membantu gerakannya, yaitu di antaranya Sudarsono Sugra dan Hamdani Karthamuhari. Ia berusaha menghimpun bekas anggota gerakannya, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia, yang kiranya sanggup bergerak menentang gerakan fasisme Jepang.

Golongan Syahrir mengadakan kerja sama dengan golongan Sukarni, yang terdiri dari pemuda-pemuda yang bersikap revolusioner. Pada zaman kolonial, Sukarni dikenal sebagai anggota Pengurus Besar Indonesia Muda sehingga ia bukan orang baru dalam gerakan nasional. Ia bersikap kooperatif dan bekerja sebagai pegawai kantor Sendebu (bagian propaganda). Ia berusaha mengumpulkan tenaga-tenaga muda yang revolusioner, cakap, dan berani, untuk dididik sebagai propagandis paham nasionalisme secara ilegal. Di antara pemuda-pemuda yang mengelilingi Sukarni adalah Adam Malik, Ammunanto, Panduwiguna, Kusneni, Samsudin, dan M. Nitimiharjo. Mereka termasuk golongan sosialis-kiri yang ingin membentuk kekuatannya melalui massa-aksi sesuai dengan cita-cita Tan Malaka. Mereka menjauhkan diri dari kaum nasionalis kooperatif, dan mendekati rakyat, terutama tentara sukarela Peta. Untuk mengetahui sampai di



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

kekuasaan di Jawa dan Madura—karena mereka langsung berhubungan dengan opsir-opsir Angkatan Laut yang tidak senang terhadap pendudukan Angkatan Darat. Sikap opsir-opsir Angkatan Laut itu memberi kesan seolah-olah mereka itu tidak rela bahwa pemerintahan pendudukan di Jawa dan Madura diserahkan kepada Angkatan Darat. Hubungan yang tidak selaras antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut itu diketahui juga oleh Mr. Subardjo, Wikana, Sudiro, dan Chairudin karena mereka bekerja di lingkungan Angkatan Laut. Pada pertengahan tahun 1944, pihak Angkatan Laut menyelenggarakan asrama pelajar di Jakarta. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Wikana. Di sana, para pelajar mendapat pelajaran dari para pemimpin Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Subardjo, Iwa Kusumasumantri, dan lain-lain. Pelajaran tentang Marxisme merupakan pelajaran utama. Wikana sendiri adalah tokoh komunis muda dan bekas anggota Gerindo, berhaluan anti-fasis. Anjuran mengajarkan doktrin Marxisme pada waktu itu bertalian erat dengan keinginan pemerintah Jepang bekerja sama dengan Rusia. Sampai bulan Juli, pihak Jepang menghendaki Rusia bergabung dengan Jepang dalam melancarkan Perang Pasifik, namun harapan itu terbukti sia-sia.

Di samping itu, di Jakarta ada golongan pemuda yang tergabung dalam asrama Angkatan Baru Indonesia, berpusat di Menteng 31. Sejak tahun 1943, pemuda Menteng 31 mengorganisir Barisan Pelopor, yang intinya dijadikan pengawal Soekarno sebagai ketua Putera, di antaranya adalah Ir. Sakirman, D.N. Aidit, dan Hanafi. Mereka juga mengorganisir persatuan tukang becak dan buruh kendaraan. Barisan Pelopor yang diorganisir oleh D.N. Aidit berganti nama Barisan Benteng, anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda belasan tahun, yang mendapat latihan militer, berbaris, dan menembak dengan senapan kayu untuk menanamkan jiwa keprajuritan. Melihat kekalahan pihak Jepang, pemuda Menteng 31 secara diam-diam membentuk Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), diketuai oleh D.N. Aidit dengan bantuan M.H. Lukman dan Kertapati. Mereka membuat sel-sel kerja dan mengadakan

hubungan dengan pemuda-pemuda dan golongan lain secara diam-diam. Di antara pemuda Menteng 31 yang juga terkemuka adalah Adam Malik, Chairul Saleh, Subadio Sastrasatomo, dan B.M. Diah. Meskipun pemuda-pemuda seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan A.M. Hanafi sebenarnya adalah kader-kader komunis, mereka bergerak demi kepentingan nasional, tidak demi kepentingan partai komunis karena pada waktu itu tidak ada partai politik. Mereka bergerak untuk menghadapi bala tentara pendudukan Jepang yang dipandang sebagai penjajah tanpa membedakan aliran paham.

Pemuda pelajar yang sedang mendaki usia dewasa, penuh semangat kepahlawanan, merupakan motor pergerakan melawan gejala-gejala yang kurang sehat di dalam masyarakat. Mereka masih bebas, belum memikul beban kekeluargaan, pikirannya masih bersih, dan cita-citanya tinggi. Dengan sendirinya, mereka bertindak lebih berani dalam melawan kebobrokan masyarakatnya daripada orang-orang yang sudah tua. Di mata orang-orang yang sudah tua, kadangkala tindakannya *grusa-grusu*, asal berani dan kurang perhitungan karena memang demikian pembawaan pelajar pada umumnya. Justru karena pembawaan yang demikian itu mereka merupakan tenaga revolusioner yang sangat diperlukan di masa-masa gawat untuk mendobrak. Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia (Baperpi) yang berpusat di Cikini 71 di bawah pimpinan Supeno, merupakan salah satu motor pergerakan menuju proklamasi. Di samping Baperpi, ada Persatuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ika Daigaku, berpusat di Prapatan 10. Pemimpin-pemimpinnya adalah Djohar Nur, Sajoko, Sjarif Thajeb, Darwis, dan Eri Sudewo. Pada hakikatnya, aktivitas golongan pemuda-pemuda di atas tidak dapat dikatakan gerakan di bawah tanah karena aktivitasnya hanya terbatas sampai pada penyiaran berita, bukan secara nyata perlawanan terhadap bala tentara Jepang. Barang kali lebih tepat golongan itu disebut sebagai kelompok tenaga nasional.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Bab II

DI SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN

1. Perbedaan Siasat

Pada tanggal 26 Juli 1945, dalam pertemuan di Potsdam, sekutu berseru kepada pemerintah Jepang agar menyerah tanpa syarat dan mengembalikan semua daerah pendudukan. Ditambahkan bahwa Jepang akan segera diduduki oleh tentara sekutu yang akan membentuk pemerintahan militer. Seruan itu tidak dihiraukan. Demi penyelamatan jiwa yang akan menjadi korban perang, sekutu berniat menghentikan perang di Asia Timur Raya yang sudah berlarut-larut. Oleh karena itu, kapal terbang sekutu mengebom atom kota Hiroshima tanggal 6 Agustus dan kota Nagasaki tiga hari kemudian (9 Agustus). Pada hari itu juga, Rusia mengumumkan kesediaannya bergabung dengan sekutu dan segera mengirimkan pasukan-pasukannya untuk menyerbu Manchuria. Bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki memaksa pihak Jepang menyerah dan menerima syarat-syarat yang diumumkan dalam pertemuan di Potsdam tanggal 14 Agustus 1945.

Tanggal 14 Agustus itu, delegasi Indonesia yang baru pulang dari Saigon memberikan keterangan di lapangan terbang Kemayoran bahwa soal kemerdekaan Indonesia sudah sepenuhnya ada di tangan bangsa Indonesia. Dengan bangga Soekarno menyatakan sewaktu-waktu kita bisa merdeka dan itu bergantung kepada dirinya dan

kemauan rakyat dalam memperbarui tekadnya meneruskan perang suci Dai Toa. Jika sebelumnya Soekarno berkata bahwa sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang bisa dipastikan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbuah. Pernyataan itu membuktikan bahwa sebenarnya Soekarno tidak tahu bahwa pada hari itu Jepang menyerah kepada sekutu.

Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu meskipun masih dirahasiakan oleh bala tentara pendudukan, sudah banyak diketahui orang. Pada tanggal 14 Agustus petang, Sutan Syahrir membawa berita tersebut kepada Hatta dan menanyakan bagaimana masalah kemerdekaan Indonesia sehubungan dengan peristiwa tersebut. Jawaban Hatta adalah bahwa soal kemerdekaan ada di tangan bangsa Indonesia sepenuhnya. Syahrir menyarankan agar kemerdekaan itu sekali-kali jangan diumumkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, namun oleh Soekarno sendiri sebagai pemimpin rakyat melalui radio. Sebabnya adalah karena kemerdekaan yang diumumkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan akan dianggap oleh pihak sekutu sebagai hadiah dari Jepang. Jadi, Indonesia merdeka adalah buatan Jepang.

Pada tanggal 15 Agustus pukul 8 diadakan rapat di sebuah ruangan di Bacteriologisch Laboratorium Pegangsaan timur, dihadiri oleh beberapa pemuda: Choirul Saleh, Darwis, Djoharnur, Kusnandar, Subardio, Subianto, Margono, Aidit, Sunyoto, Abu Bakar, Eri Sudewo, Wikana, dan Armansjah. Pertemuan itu memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digabungkan pada bangsa atau negara lain. Bangsa Indonesia, menurut anggapan mereka, sudah matang untuk merdeka. Satu-satunya jalan adalah melalui proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri, lepas dari bangsa dan negara mana pun juga. Sesuai dengan janjinya kepada Syahrir, hari berikutnya Hatta mencari keterangan dari Gunseikanhu tentang penyerahan Jepang. Setelah yakin bahwa berita penyerahan Jepang itu memang benar, Hatta mengambil keputusan untuk mengundang Panitia Persiapan Kemerdekaan. Hatta berkata:

Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

“Maka kami putuskan mengundang Panitia Persiapan berapat pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi di kantor Dewan Sanyo di Pejambon 2. Undang-Undang Dasar harus disepakati dengan tiada banyak berdebat dan susunan pemerintahan Indonesia di pusat dan daerah harus dapat diselenggarakan dalam beberapa hari saja. Anggota-anggota Panitia Persiapan dari luar Jawa harus kembali secepat-lekasnya daerah masing-masing dengan membawa instruksi yang lengkap dari Pemerintah Indonesia Merdeka. Waktu tidak boleh terbuang karena kalau mereka terlambat pulang, mungkin mereka dihalang-halangi berangkat oleh Jepang yang sejak menyerahkan kedudukannya di Indonesia hanya sebagai juru kuasa sekutu untuk menindas dan melikuidit Indonesia merdeka. Kami harus mempertimbangkan bahwa sekutu akan mencoba mengembalikan Indonesia ke bawah pemerintahan Hindia Belanda. Revolusi yang diorganisir harus ada, barulah kemerdekaan dapat dipertahankan dengan perjuangan yang dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia.”

Dari tulisan di atas nyata bahwa sejak tanggal 15 Agustus sudah ada niat pada Soekarno-Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia dengan membawa serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diundang berapat pada tanggal 16 Agustus. Proklamasi kemerdekaan akan diumumkan dalam rapat itu. Jelas bahwa rencana pengumuman itu timbul mendahului rapat para pemuda di Pegangsaan Timur yang diselenggarakan pada tanggal 15 pukul 8 malam. Rapat mengirim utusan untuk menyampaikan keputusan dan berunding dengan Soekarno-Hatta. Utusan datang pukul 10 malam di Pegangsaan Timur 56 bertemu dengan Soekarno, mendesak agar Soekarno segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu tibanya hadiah kemerdekaan dari Jepang. Jawaban Soekarno adalah: “Saya belum percaya akan penyerahan Jepang sebelum pihak resmi menyampaikan berita itu. Tentang kemerdekaan Indonesia, tentu kita akan merdeka karena soal ini sekarang tinggal menunggu waktunya saja; sebab segala persediaan sesuatunya sudah hampir selesai.” Karena jawaban itu, terjadilah perdebatan antara Soekarno dan para utusan. Mr. Subardjo mengetahui bahwa Soekarno sedang dikerumuni pemuda-pemuda. Ia lalu pergi ke rumah Hatta untuk mengajaknya ke Pegangsaan Timur 56.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

nama bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus pagi pukul 10 (Waktu Indonesia) isi proklamasi itu dimaklumkan kepada khalayak disusul dengan menaikkan bendera 'Sang Merah Putih'."

Baik peristiwa di gedung Pegangsaan 56 maupun di Rengas Dengklok, seperti diuraikan Hatta, diungkap kembali oleh Soekarno 20 tahun kemudian. Kata-katanya berbeda, namun isinya sama tepat. Soekarno-Hatta adalah saksi utama tentang peristiwa tersebut. Uraian itu kiranya dapat dipercaya para anggota atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diundang pada tanggal 15 Agustus, memenuhi undangan dan datang berkumpul di gedung Pejambon 2, namun yang tidak hadir adalah Soekarno-Hatta, pengundangnya, berhubung peristiwa penyingkirannya ke Rengas Dengklok. Oleh karena itu, mereka yang hadir heran. Salah seorang di antaranya adalah Mr. Subardjo. Satu-satunya jalan untuk mengetahui di mana Soekarno-Hatta adalah menghubungi Wikana. Dari Wikana ia tahu bahwa Soekarno-Hatta disingkirkan ke Rengas Dengklok. Demikianlah, kedatangan Subardjo ke Rengas Dengklok bukanlah suatu kebetulan. Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan ditunda sampai malam harinya di gedung kediaman Admiral Maeda di jalan Nassau Boulevard (Jalan Imam Bonjol), di Jakarta karena hotel Des Indes (Hotel Duta Indonesia), tempat rapat akan diadakan, telah ditutup. Penyelenggaraan rapat di gedung kediaman Admiral berlangsung berkat hubungan Mr. Subardjo dan Wikana di satu pihak dan penghuninya di lain pihak.

Admiral Maeda memberi jaminan keamanan selama rapat dilangsungkan. Di luar pagar adalah daerah militer Angkatan Darat, bukan tanggung jawabnya. Demi keamanan rakyat, Soekarno menghubungi Kolonel Nishimura, ajudan Gunseikan, dan meminta agar Gunseikan bersikap netral terhadap proklamasi kemerdekaan. Kolonel Nishimura memberi tahu bahwa tentara pendudukan Jepang tidak lagi mempunyai kekuasaan apa pun, hanya bertindak sebagai polisi keamanan sekutu. Oleh karena itu, tidak diberi wewenang mengadakan perubahan apa pun. Karenanya, janji untuk memberikan kemerdekaan tidak dapat ditemui. Jika pemuda-pemuda Indonesia



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dengan “Menurut Undang-Undang Dasar”. Bab XI pasal 29 yang berbunyi “Kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus sama sekali dan diganti dengan “Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Dengan perubahan-perubahan kecil di atas, Rencana Undang-Undang Dasar yang telah disiarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu disahkan dalam rapat tanggal 18 Agustus. Kecuali pengesahan Undang-Undang Dasar, sidang telah memilih Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai wakil Presiden. Untuk menjalankan pekerjaannya, presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Kemudian, Soekarno-Hatta mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut: “Dengan ini dipermaklumkan bahwa pembangunan negara Indonesia merdeka yang dikendalikan oleh rakyat sekalian di waktu ini sedang berjalan dengan seksama. Beberapa tenaga yang berani bertanggung jawab terhadap rakyat ikut serta di dalam pembangunan itu. Segala hal yang perlu untuk pembangunan negara Indonesia sedang diselenggarakan dan akan selesai di waktu yang pendek. Diharap sekalian rakyat Indonesia dari segala lapisan tinggal tenteram, siap sedia, dan memegang teguh disiplin.”

Pengesahan Undang-Undang Dasar adalah syarat mutlak karena Undang-Undang Dasar adalah tempat berdirinya negara, berupa pedoman kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, berbeda dengan dasar atau fundamen perumahan. Undang-Undang Dasar negara mempunyai pengaruh terhadap bentuk dan corak negara yang didirikan. Tidak demikian halnya dengan fundamen perumahan karena tugas fundamen perumahan semata-mata hanya untuk menata bangunan. Boleh dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan pola yang dianut dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Segala langkah diserahkan kembali pada Undang-Undang Dasar, dicocokkan demi keselarasan antara perkembangan negara dan cita-cita yang akan direalisasikan. Berhasil tidaknya realisasi



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dalam menentukan jalannya pemerintahan. Siapa pun yang berkesempatan memegang pemerintahan, wajib menurut pola kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar.

Kata kebijaksanaan terlalu banyak disalahgunakan untuk membenarkan suatu tindakan. Tiap pemimpin mengambil kebijaksanaan masing-masing, seolah-olah tidak ada kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar. Ukuran objektif untuk menilai tindakannya adalah mencocokkan antara tindakan dan isi Undang-Undang Dasar. Jalannya pemerintahan dipimpin oleh presiden dibantu oleh wakil presiden, yang keduanya dipilih oleh dan hanya bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, presiden disebut Mandataris MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah badan tertinggi dalam negara Republik Indonesia; itu saja yang mempunyai wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang harus direalisasikan oleh presiden. Oleh karena itu, hanya MPR yang mempunyai wewenang menilai pelaksanaan tugas presiden memimpin jalannya pemerintahan. Presiden tidak diberi wewenang untuk membuat kebijaksanaan sendiri. Tiap petugas di bawah pimpinan presiden, wajib menyesuaikan tindakannya dengan isi Undang-Undang Dasar karena tiap tindakannya harus mencerminkan realisasi isi Undang-Undang Dasar. Hanya dengan jalan demikian Undang-Undang Dasar itu mempunyai arti dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

Pola kebijaksanaan yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar membayangkan dua bidang utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, yakni:

1. Membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia umum dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
2. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

internasional. Kita tetap ingin menjadi bangsa merdeka, ingin damai dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia.” Presiden dan wakil presiden lalu meninggalkan sidang.

Sidang KNIP yang pertama itu menghasilkan pemilihan ketua dan wakil ketua. Ketua: Kasman Singodimedjo; Wakil ketua I: M. Sutardjo; Wakil ketua II: Latuharhary; Wakil ketua III: Adam Malik. Selanjutnya, sidang menyusun satu mosi rakyat Indonesia; Maklumat KNIP kepada seluruh rakyat Indonesia; Janji dan ikrar para anggota KNIP.

Pada tanggal 25 September, presiden mengangkat anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung yang tugasnya memberi nasihat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Jumlahnya 11 orang, yakni: Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Syaikh Djambil Djamek, H. Agus Salim, K.R.M.T. Wurjaningrat, H. Adnan, R.M. Margono Djojohadikusumo, Moch. Enoch, Dr. Latumeten, Ir. Pangeran Moch. Noor, Dr. Sukiman Wirdjosandjojo, dan Nyonya Suwarni Pringgodigdo. Dengan terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung, susunan pemerintahan pusat sudah lengkap.

3. Tanggapan Rakyat dan Lahirnya Tentara Nasional

Pada zaman pendudukan bala tentara Jepang, rakyat di Jakarta telah terbiasa dengan rapat raksasa. Setiap kali rakyat digiring ke lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) untuk mendengarkan pidato para pemimpin. Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa besar baik bagi para pemimpin maupun rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurut anggapan mereka, peristiwa itu harus disambut dengan rapat raksasa di lapangan Ikada. Keinginan mengadakan rapat raksasa itu baru terlaksana pada tanggal 19 September 1945 petang. Lapangan Ikada dibanjiri oleh rakyat. Mereka menantikan kedatangan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi, pihak Jepang tidak senang melihat peristiwa itu. Oleh karena itu, kedatangan rakyat dicegah, lapangan Ikada dijaga keras dan dipagari dengan tank



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

4. Divisi IV : meliputi Kedu-Banyumas, di bawah Kolonel Sudirman, berkedudukan di Purwokerto,
5. Divisi V : meliputi Pekalongan, Semarang, dan Pati, di bawah Kolonel Djati Kusumo, berkedudukan di Salatiga,
6. Divisi VI : meliputi Madiun-Kediri, di bawah Kolonel Sudiro, berkedudukan di Kediri,
7. Divisi VII : meliputi Bojonegoro, Surubaya, dan Madura, di bawah Major Jenderal Djono Sewodjo, berkedudukan di Mojokerto,
8. Divisi VIII : meliputi Malang-Besuki, di bawah Major Jenderal Imam Sudjati, berkedudukan di Malang,
9. Divisi IX : meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah Kolonel Sudarsono, berkedudukan di Yogyakarta, dan
10. Divisi X : meliputi Daerah Istimewa Surakarta, di bawah Kolonel Sutarto, berkedudukan di Surakarta.

Di Sumatra, Menteri Pertahanan menunjuk Dr. A.K. Gani sebagai koordinator TKR dan Suhardjo sebagai pemimpin Markas Besar Umum. Divisi-divisi yang dibentuk adalah :

1. Divisi I : meliputi Sumatra Selatan bagian selatan dan barat, di bawah Kolonel Maludin Simbolon, kemudian Kolonel Barlian, berkedudukan di Lahat,
2. Divisi II : meliputi Sumatra Selatan bagian utara dan timur, termasuk Bangka Belitung, di bawah Kolonel Hasan Kasim, kemudian Kolonel Bambang Utojo, berkedudukan di Palembang,
3. Divisi III : meliputi Sumatra Barat dan Riau, di bawah Kolonel Dahlan Jambek, berkedudukan di Bukit Tinggi,
4. Divisi IV : meliputi Sumatra Timur, di bawah Kolonel Ahmad Tohir, kemudian Kolonel Hotman Sitompul,



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Pemberontakan Latuparissa-Matulesy di Kepulauan Maluku bulan April 1946 menemui kegagalan. Pasukan KNIL berhasil menghancurkan pasukan-pasukan TKR yang sudah mendarat di beberapa pulau, seperti Buru, Seram, dan lain-lain. Kepulauan Maluku tetap dikuasai oleh pihak Belanda. Keputusan PPKI tanggal 19 Agustus, yang menyatakan bahwa Maluku adalah propinsi Republik Indonesia tidak dapat direalisasikan.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Sedangkan yang menjadi pengikut Amir Syarifuddin adalah Hendromartono, Oey Gee Hwat, Sutrisno, Usman Sastroamidjojo, Tan Ling Djie, Sukendar, Djunaedi, Subiantokusumo, dan A. Fatah. Selama kerja sama Syahrir dan Amir Syarifuddin berjalan baik, kedua golongan tersebut merupakan pendukung utama PS. Pecahnya kerja sama Syahrir dan Amir Syarifuddin pada tanggal 27 Juni 1947, membawa keretakan dalam PS. Kemudian Syahrir membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan dukungan para pengikutnya. Amir Syarifuddin membentuk partai baru dengan sokongan kuat dari golongan sayap kiri yang berorientasi komunis. Pemuda-pemuda Indonesia yang datang dari Nederland dan kemudian Maruto Darusman dan Setiadjit, memberi sokongan kepada Amir Syarifuddin. Yang segera menarik perhatian adalah timbulnya Partai Buruh yang memberi sokongan kepada kabinet Syahrir.

Partai Buruh Indonesia (PBI) tumbuh dari organisasi Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang didirikan oleh golongan pemuda Menteng 31 pada tanggal 15 September 1945. Pada tanggal 9 November BBI, mengadakan kongres di kota Surakarta. Berhubung dengan pengumuman Maklumat Politik No. 1 dan jawaban pemerintah atau usul BP KNIP tanggal 30 Oktober yang telah diuraikan di atas, muncul usulan dalam kongres untuk mengubah BBI menjadi Partai Buruh Indonesia (PBI) untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk bulan Januari 1946. Usul itu dalam pungutan suara memperoleh kemenangan tipis. Oleh karena itu, berdirilah PBI pada tanggal 9 November 1945. Mereka yang tidak setuju tetap memertahankan berdirinya BBI. Demikianlah, ada dua organisasi buruh, yang satu berupa partai politik di bawah pimpinan Sjamsu Hardja Udaja, yang satu lagi organisasi buruh di bawah nama BBI. Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, tidak mau mengakui partai politik PBI. Yang diakui adalah BBI. Sjamsu Hardja Udaja, bekas pengerah tenaga romusha pada zaman pendudukan Jepang, tidak lama memegang pimpinan PBI. Dengan kedatangan Setiadjit, seorang kader komunis yang banyak bergerak dalam Perhimpunan Indonesia sejak Hatta pulang ke tanah



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Iwa Kusumasumantri dan Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subardjo. Akan tetapi, sokongan yang paling kuat berasal dari tokoh-tokoh pemuda, seperti Sukarni, Chairul Saleh, dan Adam Malik, yang mulai dikenalnya dalam bulan Agustus. Dengan sokongan mereka itu, bulan November Tan Malaka mendirikan Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sutan Dewanis. Seperti telah disinggung, dalam perjuangannya, Tan Malaka sangat cenderung pada pembentukan massa-aksi. Juga dalam menghadapi St. Syahrir, yang dibantu oleh golongan komunis Tan Malaka, akan menerapkan taktik pembentukan massa-aksi dengan menghimpun segala tenaga perjuangan yang ada.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) didirikan pada tanggal 7 November 1945, menampung tiga organisasi Islam, yakni Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama (NU). Meskipun pada dasarnya gerakan Muhammadiyah dan NU bukan organisasi politik, berkat dukungan para anggotanya, Masyumi menjadi partai politik yang paling besar di Indonesia. Muhammadiyah bergerak di bidang sosial, terutama dalam pendidikan dan kesehatan, sedangkan NU dalam bidang pendidikan agama. Karena kedua organisasi Islam tersebut sudah bergerak sejak zaman kolonial Belanda, pengaruhnya di masyarakat terlalu besar. Kaum muslim di segala pelosok di Indonesia memberikan sokongan pada partai Masyumi. Partai Sarekat Islam Indonesia sudah dikenal sejak awal abad kedua puluh dan mempunyai banyak pengikut, namun demi persatuan umat Islam di Indonesia, PSII berlindung di bawah bendera partai Masyumi. Tokoh-tokoh Masyumi, seperti Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, Mr. Moh. Roem, Mohammad Natsir, Mr. Jusuf Wibisono, Dr. Abu Hanifah, dan Dr. Sukiman adalah tokoh-tokoh dalam gerakan Islam yang sudah lama dikenal di dalam masyarakat. Berkat pendidikannya, banyak di antara para pemimpin Masyumi yang berpandangan luas; pandangan politik mereka tidak berbeda dengan para pemimpin partai politik lainnya, seperti Partai Sosialis dan PNI. Karena partai-partai politik itu mempunyai tujuan yang sama, para pemimpinnya dapat saling mendekati dan saling memahami. Pada hakikatnya, yang berbeda hanya wadahnya.

Meskipun demikian, partai Masyumi tidak dapat bekerja sama dengan para komunis PKI akibat perbedaan asas dan perselisihan yang sudah tradisional antara PKI dan Partai Sarekat Islam sejak tahun 20-an. Oleh karena itu, sikapnya terhadap kabinet Syahrir yang didukung oleh sayap kiri juga kurang menyenangkan.

Badan perjuangan yang bernaung di bawah bendera Partai Masyumi adalah Hizbullah, terdiri dari pemuda-pemuda Islam berumur belasan dan dua puluhan tahun, jumlahnya tiga puluhan ribu. Boleh dikatakan bahwa Hizbullah adalah angkatan bersenjata partai Masyumi, barisan pejuang kemerdekaan dari golongan Islam, dan penjaga keselamatan golongan Islam dan partai Masyumi.

Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) didirikan pada tanggal 8 Desember 1945 di kota Surakarta oleh I.J. Kasimo dan F.S. Harjadi, yang bertahun-tahun menjadi ketua dan wakil ketua partai. Partai Katolik sudah ada sejak tahun 1923, berpusat di Yogyakarta dengan nama *Pakempalan Politik Katolik Jawi*.

2. Perebutan Pimpinan Revolusi

Soekarno-Hatta sebagai pimpinan revolusi, akibat kerja samanya dengan pemerintah militer Jepang, dianggap kurang tepat oleh beberapa tokoh non-kooperatif, terutama Tan Malaka. Sutan Syahrir, juga seorang tokoh non-kooperatif, bersikap ragu-ragu terhadap Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, ia tidak segera memberikan sokongan. Baru setelah mengadakan perjalanan keliling di Jawa bersama beberapa pemuda selama dua minggu dan menyaksikan sendiri betapa besar dan meriah sokongan rakyat kepada Soekarno-Hatta, ia sanggup memberikan dukungan. Keraguan sikapnya diketahui oleh Tan Malaka. Dalam bulan September, Tan Malaka bertemu Sutan Syahrir di Serang. Dalam pertemuan itu, ia menyinggung kedudukan Soekarno-Hatta yang menurut anggapannya goyah akibat kerja samanya dengan pemerintah militer Jepang dan mengemukakan rencana perjuangan yang seharusnya dilaksanakan dalam masa revolusi merebut kemerdekaan:

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

1. Memaksa pihak lawan berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan seratus persen; untuk tujuan itu perlu dilakukan penyitaan milik asing dan penggalangan rakyat murba,
2. Menarik garis tegas yang memisahkan pihak sana dan pihak sini; kaum pamong praja masuk pihak sana dan rakyat murba masuk pihak sini,
3. Menjalankan politik bumi hangus dalam perjuangan fisik jika terpaksa mundur, dan
4. Menolak parlementarisme dan menekankan pada massa-aksi semata-mata.

Ia membujuk Sutan Syahrir untuk ikut serta menggulingkan Soekarno-Hatta dengan janji akan mengangkatnya sebagai perdana menteri jika usahanya berhasil. Syahrir menolak ajakan itu.

Dalam bulan September itu juga, Tan Malaka berhasil bertemu Soekarno berkat perantaraan Mr. Subardjo yang menjabat Menteri Luar Negeri dalam kabinet presidensiil. Seperti diketahui, Mr. Subardjo adalah kawan baik Tan Malaka sejak di Nederland dan bertemu lagi dengan Tan Malaka beberapa hari sebelum proklamasi. Apa yang dibicarakan antara Subardjo dan Tan Malaka, tidak diketahui. Dari tindakan dan sikapnya kemudian, dapat diambil kesimpulan bahwa Subardjo menyebelah kepada Tan Malaka. Dalam pertemuan dengan Soekarno, Tan Malaka memperingatkan bahwa sewaktu-waktu Soekarno dan Hatta dapat ditangkap oleh pihak sekutu akibat kerja samanya dengan pemerintah militer Jepang. Bagaimanapun, revolusi harus berjalan terus. Jika hal itu terjadi, demi suksesnya revolusi, harus ada orang yang memimpinnya. Oleh karena itu, harus dipikirkan siapa orang yang dipandang pantas untuk melanjutkan pimpinan revolusi. Soekarno terkena bujuk dan berjanji akan menunjuk Tan Malaka sebagai penggantinya. Karena pimpinan revolusi ada di tangan Soekarno-Hatta, Soekarno segera menghubungi Hatta dan memberitahukan tentang pertemuannya dengan Tan Malaka. Soekarno dipersalahkan, namun janji telah terlanjur diberikan dan sukar untuk membatalkannya. Untuk menetralkan janji



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

2. Pemerintah berharap agar partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Selaku ketua BP KNIP yang wewenangnya sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan keluarnya Maklumat Politik tanggal 1 November 1945 dan keluarnya maklumat pemerintah tentang anjuran pembentukan partai-partai politik, Syahrir merasa kuat kedudukannya. Segera ia memanggil KNIP untuk bersidang pada tanggal 25-26 November. Rapat Pleno KNIP mengesahkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh BP KNIP. Acara sidang adalah:

1. Kedudukan Komite Nasional,
2. Pembentukan partai-partai politik,
3. Penetapan politik luar dan dalam negeri bersama pemerintah,
4. Usul tentang perubahan pemerintah lama dengan:
 - a. Mengusulkan adanya pertanggungjawaban kementerian, dan
 - b. Mengusulkan susunan dewan kementerian baru.
5. Menyesuaikan dan menyempurnakan susunan KNIP sebagai badan yang untuk sementara menjalankan kuasa yang ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Perwakilan Rakyat.

Keputusan sidang pleno KNIP diumumkan tanggal 25 November 1945, ditandatangani oleh Syahrir selaku ketua BP KNIP. Keputusan No. 4a-b menyebabkan jatuhnya kabinet lama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Watak kabinet berganti dari presidensiil menjadi parlementer yang pertama. Susunan kabinet Syahrir seperti berikut:

Perdana Menteri	St. Syahrir
Menteri Luar Negeri	St. Syahrir
Menteri Dalam Negeri	St. Syahrir
Menteri Pertahanan	Amir Syarifuddin
Menteri Penerangan	Amir Syarifuddin
Menteri Pendidikan	T.G. Mulia



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

merupakan golongan kuat dan menaruh simpati pada kemerdekaan Indonesia. Berpegang pada kecemannya terhadap golongan kooperatif, ia menginginkan kabinet yang menteri-menterinya adalah tokoh-tokoh non-kooperatif, terutama bukan bekas kolaborator Jepang. Itulah sebabnya ia meninggalkan tokoh-tokoh nasional, seperti Ki Hadjar Dewantara yang atas pertimbangan politik pernah berkecimpung dalam gerakan Putera, dan Mr. A. Subardjo, bekas pegawai tinggi Angkatan Laut Jepang. Meskipun demikian, ia tidak dapat menyingkirkan tokoh-tokoh nasional Soekarno-Hatta berkat kepopuleran dan kewibawaan mereka di dalam masyarakat di seluruh Indonesia serta kenyataan bahwa Soekarno-Hatta adalah proklamator kemerdekaan. Dengan terbentuknya kabinet parlementer, Soekarno-Hatta hanya memegang kedudukan presiden dan wakil presiden konstitusional. Yang bertanggung jawab dalam pemerintahan adalah Syahrir. Terhadap sekutu dan Belanda, ia dapat membanggakan bahwa kabinetnya bebas dari pengaruh Jepang dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi sekutu dan Belanda untuk menuduh bahwa Republik Indonesia dikemudikan oleh bekas kolaborator Jepang kelas utama. Hal itu akan melicinkan perundingan Indonesia-Belanda. Dengan memertahankan Soekarno-Hatta, Syahrir mengharapkan dukungan luas dari masyarakat Indonesia berkat kepopuleran Soekarno-Hatta. Dari kerja samanya dengan Syahrir, Soekarno-Hatta mendapat keuntungan juga karena Syahrir bertindak sebagai perisai terhadap serangan Tan Malaka dan pihak Belanda. Demikianlah, di awal revolusi, Soekarno, Hatta, dan Syahrir merupakan tiga sejoli dalam memertahankan Republik Indonesia dari serangan baik dari dalam maupun dari luar.

Untuk menambah kelancaran perundingan Indonesia-Belanda, Syahrir menampung tokoh-tokoh seperti Mr. Suwandi dan Dr. T.G. Mulia, yang pada zaman kolonial Belanda bekerja di Departemen Pendidikan. Secara formal ia tidak menampung tokoh komunis di dalam kabinet karena duduknya tokoh komunis di dalam kabinet akan memberi alasan kepada pihak Belanda—yang tidak senang pada gerakan komunis—untuk mengecap Republik Indonesia sebagai



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

diplomasi dengan pihak Belanda. Dalam waktu yang gawat akibat pendaratan tentara sekutu dan berkobarnya pertempuran-perempuran di berbagai tempat, kekuatan militer merupakan faktor pertahanan vital. Diplomasi dengan pihak Belanda tanpa dukungan kekuatan militer tidak akan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Jenderal Sudirman bahkan ikut duduk dalam Panitia Perumus program minimum yang dihasilkan oleh sidang Persatuan Perjuangan, yang terdiri dari Ibnu Parna (Pesindo), Wali al-Fatah (Masyumi), Ir. Sakirman (Dewan Pusat Perjuangan Jawa Tengah), wakil PNI Mangunsarkoro, Abdulmadjid (Partai Sosialis), Jenderal Sudirman (Markas Besar TRI), Atmadji (Tentara Laut Republik Indonesia), Ny. Mangunsarkoro (Perwari), Tan Malaka dan seorang anggota panitia musyawarah di Surakarta. Program minimum Persatuan Perjuangan, rumusannya adalah seperti berikut:

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan seratus persen,
2. Pembentukan Pemerintahan Rakyat (pemerintah yang sehaluan dengan keinginan rakyat),
3. Pembentukan Tentara Rakyat (tentara yang sehaluan dengan kemauan rakyat),
4. Melucuti tentara Jepang,
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa,
6. Menyita dan menyelenggarakan perkebunan musuh, dan
7. Menyita dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).

Program minimum itu mengikat perhatian organisasi-organisasi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan, dan disodorkan kepada pemerintah sebagai tuntutan revolusi rakyat Indonesia. Bersenjatakan program minimum itu, Tan Malaka menentang Syahrir, yang menurut anggapannya, terlalu banyak memberikan konsesi kepada pihak Belanda dalam perundingan. Lahirnya Persatuan Perjuangan bersama program minimumnya mengakibatkan perpecahan antara pemerintah dan rakyat karena Persatuan Perjuangan sebagai cerminan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pemungutan suara di kemudian hari. Pihak Belanda, yang diwakili oleh Van Mook, tidak sanggup menerima saran/usul di atas dengan alasan bahwa Indonesia tidak dapat dipecah-pecah. Mengenai saran/usul itu, Van Mook perlu mendengar pendapat pemerintah Nederland. Oleh karena itu, ia berangkat ke Nederland untuk berunding dengan pemerintah Nederland. Perundingan pindah dari Jakarta ke Nederland, bertempat di Hoge Veluwe dari tanggal 23-24 April. Dalam perundingan itu, pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan Mr. A.K. Pringgodigdo. Perundingan gagal. Sepulangnya dari Nederland, Van Mook menyusun usul baru yang mirip dengan usul lama ditambah dengan niat pemerintah Nederland untuk mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Sumatra, Jawa, dan Madura. Usul disampaikan kepada Syahrir untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Pihak Belanda waktu itu menjalankan diplomasi yang dibarengi dengan kekuatan militer untuk menekan pihak Indonesia. Syahrir insaf bahwa pihak Belanda memaksakan kemauannya dengan ancaman serangan militer. Perlu dicatat bahwa Mr. Suwandi sehabis berunding di Hoge Veluwe membawa pulang Drs. Maruto Darusman dan Drs. Setiadjit, dua orang tokoh komunis yang ikut menyiapkan rencana Uni Indonesia-Nederland. Drs. Setiadjit segera menggabungkan diri ke dalam Partai Buruh; Drs. Maruto Darusman dalam PKI; dan Abdulmadjid, yang sudah mendahului pulang, terjun dalam Partai Sosialis. Ketiganya adalah penyokong kabinet Syahrir.

Sementara itu, Tan Malaka beserta Persatuan Perjuangan terus berusaha menggulingkan kabinet Syahrir. Pada tanggal 15 Maret, ketika Syahrir sedang berunding dengan Van Mook di Jakarta, Tan Malaka menyelenggarakan pertemuan Persatuan Perjuangan di kota Madiun. Pertemuan di Madiun tidak semeriah pertemuan di Purwokerto dan Surakarta. Semangat Persatuan Perjuangan sudah mulai kendor, barangkali akibat kegagalan pembentukan kabinet yang baru saja berlalu. Untuk mencapai tujuannya, Tan Malaka menempuh dua jalan, yakni politik dan kekerasan; membagi perjuangannya ke



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Kementerian	Pejabat	Aliran/Partai
Perdana Menteri	Sutan Syahrir	Partai Sosialis
Menteri Luar Negeri	Sutan Syahrir	Partai Sosialis
Wakil	H. Agus Salim	non-partai
Menteri Dalam Negeri	Mr. Moh. Roem	Masyumi
Wakil	Wijono	Partai Sosialis
Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtodiprodo	PNI
Wakil	Mr. Hadi	non-partai
Menteri Keuangan	Mr. Safrudin Prawiranegara	Masyumi
Wakil	Mr. Lukman Hakim	PNI
Menteri Kemakmuran	Dr. A.K. Gani	PNI
Wakil	Mr. Jusuf Wibisono	Masyumi
Menteri Pendidikan	Mr. Suwandi	non-partai
Wakil	Ir. Gunarso	non-partai
Menteri Kesehatan	Dr. Darmasetiawan	non-partai
Wakil	Dr. Leimena	Parkindo
Menteri Sosial	Mr. Maria Ulfah Santoso	non-partai
Wakil	Mr. Abdulmadjid	Partai Sosialis
Menteri Agama	Faturrachman	Masyumi
Menteri Pertahanan	Mr. Amir Syarifuddin	Partai Sosialis
Wakil	Harsono Tjorkoaminoto	Masyumi
Menteri Penerangan	Mohammad Natsir	Masyumi
Wakil	A.R. Baswedan	Organisasi Arab
Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	non-partai
Wakil	Dr. Setiadjit	Partai Buruh
Menteri Pekerjaan Umum	Ir. Putuhena	Parkindo
Wakil	Ir. Laoh	PNI
Menteri Negara	Hamengkubowono IX	non-partai
Menteri Negara	Wahid Hasyim	Masyumi
Menteri Negara	Wikana	PKI



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

ke dalam dan ke luar akan pula menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang berarti bagi bangsa kita. Mudah-mudahan hal ini akan cukup diinsafi oleh tiap-tiap kita.”

Pada tanggal 14 Desember 1946, sayap kiri mengeluarkan sebuah manifes yang menyatakan sebab-sebab apa sayap kiri menerima rencana Persetujuan Indonesia-Belanda yang disebut naskah Persetujuan Linggajati, dengan kata-kata berikut:

Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, faktor-faktor yang terpenting adalah:

1. Menaruh kepercayaan kepada kekuatan rakyat jelata sebagai sumber untuk menyusun tenaga rakyat di seluruh lapangan buat meneruskan revolusi kita,
2. Adanya partai yang memberi pimpinan kepada revolusi itu, partai yang tidak bimbang melawan imperialisme dan fasisme dan anti-haluan lebih kiri daripada kiri. Menolak rencana Persetujuan Indonesia-Belanda berarti bahwa kita memperbesar kemungkinan-kemungkinan dari pihak kaum imperialis dan reaksioner baik dari luar maupun dari dalam untuk memukul revolusi kita kembali. Keadaan pada dewasa ini membuktikan bahwa dengan jalan halus atau kasar mereka akan menggunakan setiap kelemahan revolusi kita.

Jadi, teranglah bahwa syarat-syarat yang telah dikemukakan tadi hanya dapat dilaksanakan kalau kita menerima rencana persetujuan.

Organisasi-organisasi yang menerima naskah Persetujuan Linggajati adalah Sarekat Buruh Minyak, PKRI, Pengurus Besar Partai Rakyat, Barisan Buruh Listrik dan Gas, Pesindo, Partai Sosialis, Partai Komunis, Markas Besar Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia (AMKRI), Partai Tani, Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, Sarekat Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Yogyakarta, Sarekat Buruh Gula, dan Persatuan Buruh Indonesia. Alasan penerimaannya oleh organisasi-organisasi tersebut berbeda-beda rumusannya, namun jiwanya sama. Mereka meng-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Melihat kehebohan organisasi-organisasi dalam menghadapi naskah Persetujuan Linggajati, Presiden Soekarno khawatir naskah Persetujuan Linggajati tidak akan disahkan oleh sidang KNIP. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 30 Desember 1946 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 yang isinya bahwa presiden dengan menggunakan hak istimewanya akan menambah jumlah anggota KNIP dari 200 menjadi 514, dengan dalih penyempurnaan KNIP, agar sesuai dengan aliran-aliran politik serta golongan-golongan besar dalam masyarakat Indonesia. Pasal 1 dari Peraturan Presiden No. 6 menyebutkan tentang pembebasan orang-orang dari keanggotaan KNIP akibat pemangkuan jabatan-jabatan tinggi, seperti presiden, wakil presiden, menteri, direktur jenderal atau sekretaris departemen, sekretaris negara, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada pasal 2 presiden menganjurkan agar partai-partai politik besar dan golongan-golongan besar yang namanya tercantum dalam daftar yang dilampirkan menganjurkan calon-calon untuk diangkat sebagai anggota KNIP.

KNIP bersidang di Gedung Rakyat di kota Malang pada tanggal 25 Februari, mulai pukul 10.00 pagi. Tiga hari berturut-turut sidang membahas dan mengesahkan Peraturan Presiden No. 6. Oleh beberapa pembicara, Peraturan Presiden No. 6 itu ditafsirkan sebagai usaha pemerintah untuk memperoleh tambahan sokongan dalam pemungutan suara mengenai naskah Persetujuan Linggajati sehingga naskah persetujuan itu dapat disahkan. Pada tanggal 27 Februari, Wakil Presiden Hatta memberikan penjelasan. Dikatakan bahwa penambahan anggota KNIP menurut Peraturan Presiden No. 6 sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari imbalan antara yang pro dan kontra terhadap naskah Persetujuan Linggajati. Dengan pedas dan nada marah Hatta berkata:

“Tuduhan semacam itu adalah yang terberat yang ditujukan kepada Kepala Negara. Hendaknya diketahui bahwa dengan susunan KNIP lama naskah Linggajati itu sudah ‘goal’ karena imbalan pro dan kontra sedikit-dikitnya 151 lawan 104. Teranglah bahwa tindakan presiden itu ialah untuk me-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

kegelapan, serta mengembalikan suasana yang terang dan jernih mengembalikan suasana yang objektif. Suasana, di dalam mana pekik 'merdeka' tidak lagi mengancam sesama manusia, tetapi sebagai pekik kemanusiaan yang dapat pula menggerakkan tiap-tiap manusia yang lain, yang di dalam suasana baru yang lega ini, jiwa kemanusiaannya mudah pula tergerak oleh tiap ucapan kemanusiaan..."

Dr. HJ. Van Mook berkata, di antaranya adalah:

"Dan sekarang sudah sebegitu jauh sehingga bukan saja dua pemerintah, akan tetapi sebenarnya dua bangsa sudah melahirkan dasar yang pertama guna berjalan bersama-sama sebagai bangsa yang sederajat dan setingkat, dua bangsa yang dapat mempunyai keyakinan yang lebih dalam lagi dari kemungkinan-kemungkinan pergaulan ini. Pada kedua pihak masih terdapat lagi banyak orang yang oleh ketidaksanggupannya, penyesalan atau tidak mempunyai tekad untuk melupakan masa yang lampau, tidak melihat akan keuntungan-keuntungan dari pergaulan ini, tidak menyetujui "Persetujuan" yang telah dicapai. Suara-suara mereka akan hilang jika apa yang sekarang disetujui di atas kertas akan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan. Dan kebenaran perjanjian ini harus kita laksanakan. Karena negeri telah miskin dan membutuhkan sangat akan pengembalian keamanan dan pembaharuan pekerjaan. Sekarang perselisihan-perselisihan di kalangan sendiri serta perkelahian kedaerahan yang hingga sekarang menghalangi atau melambatkan pembangunan kembali dapat berakhir. Mulai dari sekarang semua ucapan-ucapan umum pada kedua belah pihak harus menghentikan suara yang bernadakan ketidakpercayaan, prasangka dan permusuhan serta pengumuman harus ditujukan kepada pembangunan."

Kemudian menyusul komunike, yang di antaranya berbunyi demikian:

"Tak ada seorang pun juga akan dituntut atau mendapat kesukaran dengan cara yang lain, oleh karena ia telah menggabungkan diri dengan salah satu pihak atau mencari perlindungan kepada salah satu pihak. Pemerintah Belanda dan pemerintah Republik akan menjaga dengan segala kekuatan supaya peraturan ini diindahkan dan akan menghukum segala pelanggaran selekas-lekasnya. Selain daripada itu kedua belah pihak akan mengadakan segala usaha supaya mereka yang telah



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

rapat. Sayap Kiri, PB Masyumi, Partai Nasional Indonesia, dan Barisan Pemberontak Republik Indonesia menolak nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei. Setelah sebulan delegasi Indonesia dan Komisi Jenderal Belanda bertukar nota, tanggal 26 Juni 1947 kabinet bersidang membicarakan tuntutan kabinet Belanda yang jiwanya sama dengan isi nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei. Syahrir selaku ketua delegasi dan perdana menteri harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan penjelasan tentang segala tindakan yang diambilnya sejak penandatanganan naskah Persetujuan Linggajati. Terbukti bahwa pelaksanaan persetujuan terbentur pada perbedaan tafsiran. Demikianlah, timbul debat yang sangat hebat dalam sidang kabinet. Suasana menjadi panas, kegentingan meningkat. Sayap Kiri yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin memutuskan: "Tidak menyetujui kompromi yang terkandung dalam surat-menyurat antara delegasi Indonesia dan Komisi Jenderal karena tidak menjamin persatuan antara pemerintah dan rakyat." Akibat putusan Sayap Kiri tersebut maka kabinet Syahrir yang ketiga bubar. Kabinet Syahrir dijatuhkan oleh partainya sendiri. Suatu peristiwa yang agak aneh. Oleh karena itu, timbul berbagai interpretasi terhadap tindakan Amir Syarifuddin tersebut. Yang senang, membenarkan; yang tidak senang, mencela.

Akibat sikap Amir Syarifuddin itu, Partai Sosialis pecah menjadi dua. Golongan Syahrir menyebut dirinya Partai Sosialis Indonesia dan dikenal sebagai Partai Sosialis Kanan, sedangkan golongan Amir Syarifuddin Partai Sosialis saja dan dikenal sebagai Partai Sosialis Kiri. Seperti akan kita ketahui nanti, Partai Sosialis Kiri ini kemudian bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Setelah Syahrir meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri, ia diangkat sebagai penasihat presiden. Akibat jatuhnya kabinet Syahrir maka presiden ditempatkan dalam kedudukan yang sangat sulit. Sebelum menentukan sikap, presiden pada pukul 23.55 memanggil pemimpin-pemimpin partai dan organisasi rakyat untuk mengadakan perundingan kilat. Yang hadir dalam perundingan itu adalah Ali Sastroamidjojo (PNI), Sukiman



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Pada tanggal 15 Juli, pihak Belanda menyampaikan dua usul, yaitu tentang pembentukan direktorat bersama keamanan dalam negeri dan tentang penghentian permusuhan. Pihak Belanda menghendaki pembentukan direktorat keamanan yang stafnya terdiri dari orang-orang Belanda dan wakil-wakil negara bagian. Direktorat bekerja di bawah kekuasaan pemerintah peralihan. Direktorat keamanan menentukan di mana korps polisi istimewa akan ditempatkan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban. Mengenai penghentian permusuhan, pihak Belanda menghendaki agar pihak republik memerintahkan penghentian permusuhan selambat-lambatnya tanggal 16 Juli pukul 23.59; pada tanggal 17 Juli disusul dengan perintah menghentikan semua propaganda anti-Belanda; selambat-lambatnya tanggal 19 Juli pukul 18.00 agar dimulai pengunduran tentara republik sampai 10 kilometer dari batas daerah pendudukan Belanda; pengunduran tentara harus sudah selesai pada tanggal 21 Juli. Sesudah itu barulah dilakukan penggantian tentara Belanda dengan polisi keamanan di daerah perbatasan.

Kita lihat betapa berat tuntutan Belanda kepada pemerintah Indonesia, yang harus dilakukan dalam waktu 6 hari saja. Pada tanggal 17 Juli, usul Belanda itu dijawab oleh pihak republik. Pihak republik menghendaki agar direktorat keamanan, selain alat-alat republik, mendapat hak dari pemerintah peralihan untuk menentukan kapan dan di mana di daerah republik akan ditempatkan korps polisi istimewa. Urusan keamanan dan ketertiban dalam negeri adalah semata-mata kewajiban polisi masing-masing negara bagian. Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah telah mempunyai polisi biasa dan polisi istimewa (*mobiele brigadel mobrig*). Segala kekuatan militer yang tidak dibubarkan agar ditarik kembali ke garnisunnya masing-masing dan tidak lagi mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan. Sambil menunggu penarikan kembali kekuatan militer, di sebelah batas daerah-daerah pendudukan di Jawa dan Sumatra akan didirikan pos-pos polisi campuran.

Usul balasan itu ditolak oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli, Wakil Perdana Menteri A.K. Gani menemui Prof. Schermerhorn



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

tahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Terjadilah kemudian penandatanganan naskah Persetujuan Linggajati. Dalam usaha melaksanakan persetujuan Linggajati, Belanda memaksakan interpretasinya kepada pihak Indonesia agar diterima sepenuhnya dan mengabaikan pasal arbitrase yang terdapat di dalam naskah Persetujuan Linggajati. Bahkan, pihak Belanda, alih-alih mengurangi kekuatan militernya, malah menambah dan melebihi jumlah yang telah disetujui dalam naskah Persetujuan Linggajati. Bertentangan dengan jiwa persetujuan Linggajati, Belanda mendirikan negara-negara di Indonesia Timur dan Borneo. Karena pihak Indonesia tidak sanggup menelan segala usul Belanda mengenai interpretasi Persetujuan Linggajati, pihak Belanda lalu mengadakan tindakan militer yang disebutnya aksi militer. Pada hakikatnya, hal itu adalah perang terbuka. Perintah gencatan senjata telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan kepada pihak Belanda dan Indonesia. Syahrir memuji keputusan Dewan Keamanan untuk menghentikan permusuhan, tetapi selama tentara Belanda masih ada, mereka tetap merupakan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dan terhadap perdamaian dunia. Dengan tegas dinyatakan oleh Syahrir bahwa pemerintah Indonesia menunggu keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sanggup menerima tiap arbitrase yang tidak berpihak. Sebagai kesimpulan dari penjelasannya, Syahrir menuntut agar tentara Belanda seluruhnya ditarik dari daerah Indonesia; agar Dewan Keamanan membentuk komisi arbitrase yang tidak berpihak untuk penyelesaian sengketa Indonesia–Belanda.

Sidang dilanjutkan pada tanggal 15 Agustus 1947. Wakil Belanda Van Kleffens berusaha untuk membantah keterangan Syahrir dan menyalahkan Dewan Keamanan dengan kata-kata yang pedas dan cara yang sangat tidak simpatik. Terhadap keterangan Syahrir, Van Kleffens berkata bahwa Belanda tidak pernah menentang cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang ditentang adalah kekacauan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Urusan Indonesia dilakukan di kota Yogyakarta oleh orang-orang kolaborator yang selama pendudukan bala tentara Jepang menyerahkan beribu-ribu



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Australia agar menjadi anggota Komisi Tiga Negara (KTN) untuk memenuhi keputusan Dewan Keamanan tanggal 26 Agustus 1947. Permohonan itu mendapat sambutan baik dari pihak pemerintah Australia, yang wakilnya gigih membela Indonesia di persidangan Dewan Keamanan. Pihak Belanda telah meminta kepada pemerintah Belgia. Dalam persidangan Dewan Keamanan, wakil Belgia selalu mendukung pihak Belanda. Pada tanggal 19 September 1947, - Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat sebagai negara yang ketiga dalam KTN. Amerika tidak menolak. Juga telah ditunjuk oleh pemerintah tiga negara yang bersangkutan, siapa-siapa yang akan bertindak sebagai wakil dalam KTN itu. Australia menunjuk Richard Kirby; Belgia menunjuk Paul van Zeeland, dan Amerika menunjuk Frank Graham.

8. Menuju Perundingan Renville

Pada tanggal 27 Oktober 1947, anggota KTN telah sampai di Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober, mereka berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah Indonesia, diantar oleh Wakil PM A.K. Gani, Tamzil, dan Tjoa Sik Ien. Perundingan antara KTN dan pemerintah Indonesia, yang diketuai oleh Amir Syarifuddin, berkisar pada tempat masalah di mana akan diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan akan diadakan di tempat netral yang disetujui oleh pihak Indonesia dan Belanda. Terbukti bahwa penetapan tempat yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak tidaklah gampang. Pihak Belanda semula mengusulkan agar perundingan diadakan di kota Jakarta. Meskipun demikian, pihak Indonesia tidak setuju. Telah ada 8 tempat yang disarankan baik di luar maupun di dalam negeri, di antaranya Singapura, Manila, Bangkok, dan Port Darwin. Akhirnya, dicapai suatu persetujuan untuk mengadakan perundingan di atas kapal. Amerika Serikat menyediakan kapal tentara Renville yang sedang berlabuh di dekat Shanghai. Pada tanggal 2 Desember, kapal Renville telah sampai di Tanjung Priok. Perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Amir Syarifuddin,



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

Pasal 4: “Dalam waktu tidak kurang dari enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun sesudah penandatanganan persetujuan ini, akan dilakukan suatu pemungutan suara rakyat untuk menentukan apakah penduduk-penduduk dari berbagai daerah di Jawa, Sumatra, dan Madura menghendaki supaya daerahnya merupakan bagian Indonesia atau bagian negara lain dalam negara Indonesia Serikat; pemungutan suara rakyat itu akan dilakukan dengan peninjauan Komisi Tiga Negara, yaitu kalau satu pihak selaras dengan prosedur yang tertera dalam pasal 3 di atas, minta jasa komisi dalam kedudukannya sebagai *Committee of Good Offices*. Kedua pihak dapat juga bersetuju mengambil jalan yang lain daripada pemungutan suara guna mendapat kepastian tentang kehendak penduduk-penduduk.”

Itulah beberapa pasal yang penting sebagai prinsip tambahan dari pihak KTN. Perintah gencatan senjata yang telah diputuskan dalam perundingan Renville disampaikan kepada kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dalam waktu 24 jam sesudah penandatanganan persetujuan. Di pihak Indonesia, perintah gencatan senjata diberikan oleh Panglima Besar Sudirman pada tanggal 17 Januari malam. Perintah itu terdiri dari lima pokok:

1. Menghindarkan segala provokasi berupa apa pun juga.
2. Meneruskan tugas menjamin keamanan dan ketenteraman dalam daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab Angkatan Perang Republik Indonesia.
3. Memertahankan diri apabila diserang
4. Menghindarkan segala insiden
5. Insaf bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia tetap bertanggung jawab atas keamanan, jiwa dan harta.

Komisi Tiga Negara juga memberikan iuran dalam soal gencatan senjata, yang disebut dengan istilah “Usul Natal Komisi Tiga Negara.” Menurut PM Amir Syarifuddin, Usul Natal itu telah disetujui oleh pihak Indonesia, namun dalam perundingan Renville usul itu tidak dapat diterima oleh pihak Belanda. Usul Natal itu tidak pernah secara



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

1. Memberikan sikap kami, atau
2. membenarkan pihak yang melemahkan kedudukan negara kita berhadapan dengan negara lain, dan akibatnya mempersilakan pimpinan negara ini kepada mereka itu.”

Berhubung situasi yang gawat, pembentukan kabinet tidak diserahkan kepada salah satu partai yang menjatuhkan kabinet Amir Syarifuddin, tetapi kepada Wakil Presiden Hatta. Hatta disertai membentuk kabinet presidensiil dengan tugas menyelenggarakan Persetujuan Renville, mempercepat terbentuknya negara Indonesia Serikat, dan rasionalisasi dan pembangunan. Kabinet Hatta hanya terdiri dari 17 kementerian. Jabatan perdana menteri dan menteri pertahanan dirangkap oleh Hatta, sedangkan jabatan menteri luar negeri dipegang oleh H.A. Salim. Dalam kabinet Hatta, Sayap Kiri atau Front Demokrasi Rakyat sama sekali ditinggalkan. Yang duduk dalam kabinet adalah tokoh-tokoh Masyumi, PNI, Parkindo, PKRI, PSII, dan tokoh-tokoh terkemuka yang tidak berpartai, seperti Sultan Hamengkubuwono IX dan Djuanda. Kabinet terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Mei 1948, pihak Belanda membuka Konferensi Bandung yang diakhiri oleh tokoh-tokoh federalis untuk merundingkan pembentukan pemerintah federal sementara, dipimpin oleh Van Mook. Lamanya konferensi hampir dua bulan. Meskipun konferensi itu bersifat konsultatif, hanya dimaksudkan untuk mendengarkan berbagai macam pendapat dan pandangan, konferensi itu tetap saja menggelisahkan pihak Indonesia dan KTN karena penyelenggaraan konferensi seperti itu tidak sesuai dengan isi Persetujuan Renville. Menurut Van Mook, konferensi itu tidak bisa ditunda lagi. Ucapan Van Mook pada pembukaan konferensi di atas dapat ditafsirkan bahwa ia bermaksud membentuk pemerintahan federal sementara tanpa Indonesia, yang menurut anggapan Indonesia mustahil. Pihak Indonesia mengajukan protes keras kepada KTN dan mendesak agar KTN melaporkan hal itu kepada Dewan Keamanan. Desakan Indonesia itu memang dikabulkan, namun sia-sia jika Indonesia mengharap tindakan dari Dewan Keamanan. Usaha pembentukan pemerintahan federal sementara berjalan terus. Dalam konferensi itu, pemerintah NIT memegang peranan utama. Perdana Menteri NIT, Anak Gede Agung, terbang ke Nederland hingga dua kali untuk berunding dengan pemerintah Nederland. Pada tanggal 27 Agustus 1948, Konferensi Bandung mengambil keputusan, yang ringkasnya adalah seperti berikut: Badan-badan Nasional yang akan disertai tugas memangku kedaulatan harus disusun dengan mempertimbangkan keinginan rakyat dan struktur-struktur kekuasaan pemerintah yang sudah lama berakar di Kepulauan Indonesia. Asas-asas kedaulatan rakyat dalam badan-badan nasional yang akan memangku kedaulatan Indonesia dibina di atas dasar-dasar sintesis yang selaras antara keinginan rakyat dan para raja serta golongan adat. Badan-badan nasional itu terdiri dari:

1. Direktorium sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Indonesia,
2. Kepala-kepala departemen yang disebut sekretaris negara,
3. Dewan Federal, dan
4. Badan Perwakilan Rakyat.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- a. Brigade Martono dan Jadau akan diperintahkan untuk memperkuat operasi intern kita,
 - b. Jika kita dipaksa untuk mengirimkan tentara ke front maka pasukan yang belum kita percayai sepenuhnya yang akan dikirim.
2. Memindahkan pasukan-pasukan kita ke daerah yang kita pandang strategis dan menarik dari daerah-daerah yang tidak dapat dipertahankan.
- a. Daerah Madiun akan dijadikan basis gerilya untuk perjuangan jangka panjang,
 - b. Kita harus menempatkan paling sedikit 5 batalyon di Madiun, yang harus sudah dilaksanakan bulan ini atau bulan Agustus,
 - c. Kita akan membuat Sala sebagai *Wild West* untuk menarik perhatian ke sana, namun kita harus membuat pasukan yang terkuat di sana sehingga kekuasaan *de facto* selalu di tangan kita,
 - d. Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya, dan Kediri (daerah-daerah Republik Indonesia) akan dijadikan daerah netral, dalam pengertian bahwa, kalau mungkin kita akan memperkuatnya atau meninggalkannya. Pasukan di daerah-daerah ini tidak boleh melebihi 2 batalyon, dan
 - e. Kita akan meninggalkan seluruhnya daerah Malang, Banyumas, dan Pekalongan.
3. Di samping pasukan resmi sekarang ini, kita harus mulai membangun pasukan rakyat dalam pengertian yang seluas-luasnya. Umumnya, kita akan membangun pasukan-pasukan ini secara ilegal.
- a. Dalam setiap kecamatan yang kita anggap strategis letaknya dan di mana pengaruh kita akan berakar, kelompok enam puluh orang prajurit di bawah pimpinan seorang komandan akan ditempatkan,
 - b. Keenam puluh orang ini akan dipecah menjadi 6 atau 10 orang dan dikirim ke desa-desa,



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

tentara federal. Jadi, hal itu dianggap sebagai persiapan untuk pembentukan tentara Republik Indonesia Serikat. Kesulitan itu makin meningkat dengan datangnya Divisi Siliwangi di Jawa Tengah, dipindahkan dari kantong-kantong di Jawa Barat sebagai pelaksanaan salah satu pasal Persetujuan Renville. Divisi Siliwangi diberi julukan *Stoot Leger Wilhelmina* (SLW). Penerapan undang-undang rasionalisasi dan rekonstruksi di bidang militer itu tidak menolong, namun justru mempersulit masalah.

Pada bulan Mei 1948, keluarlah Penetapan Presiden No. 14 tentang pelaksanaan teknis rasionalisasi di bidang ketentaraan. Wilayah pertahanan Republik Indonesia dibagi dua, Sumatra dan Jawa, masing-masing merupakan wilayah komando militer. Pembagian wilayah pertahanan itu berlaku mulai tanggal 15 Mei 1948. Pangkat-pangkat dalam ketentaraan akan diatur kembali. Sebagai pedoman, pangkat akan diturunkan satu tingkat agar antara pangkat dan jabatan terdapat sekadar perimbangan. Sejumlah perwira akan diberhentikan dari jabatannya dan akan diangkat sebagai perwira cadangan. Tujuh divisi yang ada di Jawa akan dilebur menjadi dua divisi. Divisi I meliputi divisi II dan III (lama), sedangkan Divisi II meliputi Divisi V, VI, dan VII (lama). Divisi I dan IV (lama) menjadi kesatuan cadangan. Mulai tanggal 15 Mei 1948, TNI Masyarakat dibubarkan dan jabatan Gubernur Militer di Surakarta dihapuskan.

Dalam penerapan rasionalisasi di bidang ketentaraan, rencana Hatta adalah sebagai berikut:

1. Melepaskan mereka yang ingin kembali pada pekerjaan semula,
2. Menyerahkan bekas tentara pada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut, dan
3. Mengembalikan seratus ribu orang ke dalam masyarakat desa.

Jumlah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1948 kurang lebih 463.000; negara tidak mampu membiayai tentara sebesar itu. Dengan memperkecil jumlah anggota APRI, pengeluaran negara akan berkurang, sedangkan kerja para bekas tentara di tempat



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pelaksanaan Rencana Bantuan Marshall merupakan penghalang besar bagi Uni Soviet dalam usahanya memperluas pengaruh komunis di Eropa Barat. Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Bantuan Marshall itu harus ditentang dan dikikis habis. Untuk tujuan itu, pada akhir bulan September Blok Uni Soviet mengadakan pertemuan untuk menetapkan garis perjuangan melawan Amerika Serikat dan menentang Rencana Bantuan Marshall. Program perjuangan yang dihasilkan oleh pertemuan adalah ketegasan adanya dua blok, yaitu blok kapitalis agresif di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok demokratis yang dipimpin Uni Soviet. Semua Partai Komunis di mana pun wajib mengutuk dan melawan pelaksanaan Rencana Bantuan Marshall. Itulah isi pokok program perjuangan baru Blok Uni Soviet.

5. Kongres Calcutta

Sampai akhir tahun 1947, kaum komunis Indonesia tidak mengetahui adanya program perjuangan baru tersebut di atas. Oleh karena itu, perjuangannya masih menganut pola perjuangan lama. Ketika para wakil *World Federation of Democratic Youth* datang di Indonesia, mereka sangat puas melihat keadaan di Indonesia karena pada waktu itu pemerintah dipegang oleh golongan kiri. Sebagai pernyataan kepuasannya, mereka setuju untuk mengadakan kongres pemuda se-Asia di kota Madiun bulan November 1947. Rencana mengadakan kongres pemuda di Madiun terpaksa dibatalkan akibat aksi militer Belanda pada bulan Juli. Oleh karena itu, kota Madiun dianggap tidak aman. Kongres Pemuda se-Asia kemudian diadakan ke kota Calcutta di India dari tanggal 19-26 Februari 1948. Kongres tersebut membahas sikap golongan komunis di Asia dalam menghadapi kaum imperialis. Menurut program perjuangan baru, tidak ada kompromi antara kaum komunis dan kaum imperialis. Di negara-negara jajahan di Asia, kaum imperialis mengadakan kerja sama dengan kaum borjuis nasional dan kaum reaksioner yang bersikap kompromistis terhadap imperialisme. Dalam menghadapi imperialisme, sikap komunis tegas menentang imperialisme. Oleh karena itu, tugas yang dihadapinya adalah mengikis habis kerja sama antara



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pada tanggal 16 September, Haji Agus Salim selaku menteri luar negeri, memberikan penjelasan dalam sidang BP KNIP. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa pengakuan unilateral dari pihak mana pun akan disambut dengan gembira oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah tidak bermaksud untuk membatalkan persetujuan yang telah dicapai dengan pihak luar negeri. Menurut pendapatnya, pengakuan kedaulatan Belanda seperti yang dipaparkan dalam persetujuan Renville, hanyalah simbolis belaka.

Akibat bocornya persetujuan Uni Soviet–Indonesia oleh Suripno dan Muso, banyak resolusi yang menuntut pelaksanaan persetujuan tersebut. Bahkan, ada di antaranya yang menganjurkan agar Indonesia memihak Blok Uni Soviet dalam menghadapi imperialis Belanda. Sebagian besar resolusi dan tuntutan itu berasal dari golongan kiri yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat dan dialamatkan kepada Kabinet Hatta.

7. Jalan Baru untuk Republik Indonesia

Muso menggunakan setiap kesempatan untuk mempropagandakan ide-ide yang dibawanya dari Uni Soviet dan menganjurkan agar ide-ide itu diterapkan di Indonesia. Dalam berbagai wawancara dengan pers, ia menegaskan bahwa sejak pada awal perkembangannya revolusi Indonesia bersikap defensif, sedangkan revolusi yang bersikap defensif, menurut anggapannya, pasti akan mengalami kekalahan atau kegagalan. Oleh karena itu, revolusi Indonesia harus meninggalkan sikap tersebut dan mengambil sikap agresif. Menurut Muso, kesalahan terbesar revolusi Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak membentuk Front Nasional, berupa gabungan dari segala tenaga progresif revolusioner yang anti-imperialis. Penggabungan tenaga progresif revolusioner dilakukan tidak hanya atas dasar kepartaian, tetapi juga atas dasar organisasi dan perorangan. Dengan jalan demikian maka segala macam organisasi dan orang yang tidak berpartai, tetapi bersikap anti-imperialis, dapat ikut bergabung. Teori perjuangan Muso itu mendapat sambutan meriah di kalangan Sayap Kiri.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

segera bertindak terhadap para pengacau di wilayah Surakarta. Rapat itu diikuti demonstrasi di gedung BP KNIP dengan membawa poster-poster, yang menyerukan agar Hatta menjalankan politik tangan resmi.

Baru pada tanggal 15 September PNI menyampaikan jawaban resmi kepada PKI atas ajakannya membentuk Front Nasional. Jawaban itu berupa penolakan karena taktik dan asas perjuangan PNI berbeda dengan taktik dan asas perjuangan PKI. Lagi pula, sampai saat itu masih ada sikap saling mencurigai di kedua belah pihak, yang tetap merupakan penghalang untuk mengadakan kerja sama.

Demikianlah, partai nasional dan partai agama menolak ajakan PKI untuk membentuk Front Nasional. Oleh karena itu, Front Nasional hanya dapat dibentuk oleh golongan Sayap Kiri saja. Karena PNI dan Masyumi tinggal di luar Front Nasional, pembentukan Front Nasional oleh golongan Sayap Kiri berjalan sangat lancar.

8. Tanggapan Kabinet Hatta

Pada tanggal 2 September 1948, Hatta selaku perdana menteri memberikan keterangan di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) di Yogyakarta. Dalam keterangannya, Hatta menjelaskan berbagai soal penting yang sedang dihadapi pemerintah. Mengenai pertikaian dalam negeri yang melemahkan kedudukan Republik Indonesia, Hatta berkata demikian:

“Tetapi kedudukan kita yang kuat ke luar itu diperlemah oleh kekusutan di dalam, oleh pertentangan politik yang makin hebat, seolah-olah kawan seperjuangan yang berlainan paham dipandang sebagai musuh yang lebih besar daripada Belanda. Tambahan lagi karena pertengkaran pendirian dalam kalangan FDR, yang melahirkan dan yang selama ini membela mati-matian persetujuan Renville, sekarang mengusulkan supaya persetujuan itu dibatalkan dan perundingan dengan Belanda diputuskan. Mereka juga menganjurkan supaya Republik yang perjuangannya adalah menentang imperialisme, terang-terangan memilih tempat



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

menetapkan negara-negara bagian dari Negara Indonesia Serikat dan merancang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat serta mengesahkan Status Uni Indonesia-Belanda.

Keterangan Hatta pada tanggal 2 September menjadi bulan-bulanan agitasi kaum komunis yang berusaha merobohkan pemerintahan Hatta. Mereka menuduh bahwa pemerintah main mata dengan pihak imperialis. Tuduhan itu pada hakikatnya timbul karena perbedaan paham dengan pemerintah, yang segan mengikuti garis perjuangan kaum komunis dan segan masuk ke dalam Blok Uni Soviet. Pemerintah beranggapan bahwa Indonesia yang merdeka adalah modal perjuangan selanjutnya. Pemerintah berniat menjalankan politik bebas, bebas dari pengaruh negara mana pun. Mengenai sosialisasi tanah, komunis menuduh bahwa pemerintah memertahankan sisa-sisa feodal yang menguasai banyak tanah. Kaum komunis akan membagi tanah itu secara rata kepada rakyat. Jawaban pemerintah adalah bahwa jika tanah akan dibagi atas dasar sama rasa sama rata, harus ada jaminan bahwa petani dapat hidup senang dari hasil tanahnya. Hal itu tidak mungkin karena tanah yang akan diterima kurang dari seperlima hektar. Untuk mempertinggi penghidupan petani, pemerintah bermaksud menjalankan transmigrasi penduduk dari Jawa ke Sumatra, yang tanahnya masih luas. Mengenai rasionalisasi angkatan bersenjata, pihak komunis menuduh bahwa pemerintah berkong-kalikong dengan pihak imperialis dan bermaksud menyerahkan tentara Indonesia yang lemah kepada tentara federal.

9. Pelaksanaan Rencana Pengacauan

Dalam konfrontasi terhadap Kabinet Hatta, FDR menggunakan segala tenaga dan kesempatan. Dalam bidang pertanian dan perburuhan, FDR menggunakan organisasi tani dan buruh yang bernaung di bawah bendera SOBSI. Konfrontasi dalam bidang perburuhan memuncak dengan pemogokan tani dan buruh pada bulan Juni 1948 di Delanggu, dua puluh kilometer sebelah barat



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

namun sepeda mereka ditemukan di Srambatan di markas kompi Lukas dari Divisi Siliwangi. Slamet Widjojo dan Padio ternyata disimpan di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Peristiwa itu ternyata menjadi pangkal perselisihan baru antara Komando Pertempuran Penembahan Senopati dan Brigade II Divisi Siliwangi. Yang satu menuduh, yang lain menyangkal. Akibatnya, pada tanggal 13 September berkobar pertempuran sengit antara Divisi Siliwangi dan Komando Pertempuran Panembahan Senopati, yang menelan korban 14 orang. Meskipun didesak oleh Panglima Besar Sudirman agar para perwira yang hilang dikembalikan, Letnan Kolonel Sadikin dari Divisi Siliwangi tetap membantah dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang penculikan. Dalam perundingan antara Letnan Kolonel Sadikin dan Letnan Kolonel Suadi terjadi peristiwa saling mengancam. Meskipun telah dikeluarkan perintah gencatan senjata dan pasukan ditarik mundur, kedua belah pihak tetap bersikap tegang. Hari-hari berikutnya, terjadi perlucutan senjata dan penahanan kendaraan oleh kedua belah pihak. Atas tuntutan Komando Pertempuran Panembahan Senopati, Panglima Besar Sudirman bermaksud mengeluarkan perintah kepada Divisi Siliwangi untuk meninggalkan daerah Surakarta dan Semarang dan menyerahkan tanggung jawab keamanan daerah kepada Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Wakil Panglima Besar Jenderal Mayor Nasution keberatan dengan alasan bahwa instruksi itu akan menyebabkan keberangkatan beramai-ramai Divisi Siliwangi ke Jawa Barat dan pertempuran antara mereka dan tentara Belanda di sana. Sikap Wakil Panglima Besar itu dijelaskan seperti berikut:

“Sikap dan pendirian kita pada waktu itu untuk mengatasi pertentangan politik dan insiden bersenjata tersebut adalah mengusahakan agar terwujud suatu suasana politik yang baik; agar tercapai persatuan-persatuan nasional yang progresif revolusioner dan negara Republik Indonesia tetap kompak-kokoh dalam menghadapi tentara kolonial yang sedang berada di ambang pintu; apa pun perselisihan yang terjadi di antara kita karena musuh utama revolusi Indonesia adalah kapitalisme dan kolonialisme.”



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pihak pemberontak. Warok-warok dipersenjatai untuk melawan pemerintah Indonesia.

13. Reaksi Pemerintah Republik Indonesia

Pada tanggal 19 September, Presiden Soekarno menegaskan sikap pemerintah terhadap kejadian di Madiun. Presiden Soekarno berkata:

“Saudara-saudara! Camkan benar-benar apa artinya itu: Negara Republik Indonesia yang kita cintai hendak direbut oleh PKI Muso. Rakyatku yang tercinta, atas nama perjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru padamu pada saat yang begini genting, di mana engkau dan kita semua mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua: Ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang insyaAllah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia kita ke Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negeri apa pun juga. Saya percaya bahwa rakyat Indonesia yang sudah sekian lama berjuang untuk mencapai kemerdekaannya, tidak akan ragu-ragu dalam menentukan sikapnya. Dan jika tidak ragu-ragu berdiri di belakang kami dan pemerintah sekarang yang sah, bertindaklah tidak ragu-ragu pula. Bantulah pemerintah! Bantulah alat pemerintah dengan sepenuh-penuh tenaga untuk memberantas semua pemberontakan dan mengembalikan pemerintahan yang sah di daerah yang bersangkutan. Madiun harus lekas di tangan kita kembali!”

Pada hari itu juga Menteri Negara Hamengkubuwono IX menandatangani bahwa pengacau negara harus segera diberantas. Pada tanggal 19 September malam, pemimpin PKI/FDR, Tan Ling Djie, Maruto Darusman, dan Ngadiman ditangkap di Yogyakarta. K. Weroyo dan Mr. Luat Siregar, anggota Fraksi PKI dalam BP KNIP masih bebas dan menghadiri sidang BP KNIP pada tanggal 20 September. Ketika itu, Wakil Presiden Hatta memberikan penjelasan tentang situasi tanah air. Hatta meminta agar BP KNIP memberikan kuasa penuh kepada presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya, selama tiga bulan saja karena undang-undang keadaan bahaya dianggap belum cukup. Pemerintah ingin bertindak cepat. Untuk



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

perebutan kuasa antara golongan bangsa Indonesia sendiri bukanlah kemenangan dalam merebut kemerdekaan yang diimpi-impikan bangsa Indonesia. Sehabis pertempuran di Dungus, kaum pemberontak meninggalkan ratusan korban manusia, terdiri dari pamong praja, tentara pelajar, dan penduduk desa yang tidak berdosa. Rumah rakyat antara Madiun dan Ponorogo dibakar. Jembatan kereta api dan jembatan jalan dihancurkan. Bibit padi musnah dimakan api, ribuan ton kayu bakar untuk persediaan kereta api menjadi abu beronggok. Kekayaan rakyat dan negara musnah akibat politik bumi hangus. Peristiwa Madiun adalah malapetaka nasional yang ditimbulkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Peristiwa itu merupakan peristiwa penuh kesedihan, pelajaran pahit bagi partai-partai politik khususnya dan rakyat pada umumnya.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

tanpa mengingat kepentingan nasional, berjangkit dalam kehidupan politik.

Dalam pidato di atas, Hatta menegaskan sikap yang harus diambil untuk mencapai kemerdekaan berdasarkan kenyataan pada masa itu, yakni adanya negara-negara BFO. Hanya melalui kerja sama dengan negara-negara federal itu kemerdekaan akan dapat dicapai. Hatta menunjukkan sikap seorang nasionalis moderat, bukan nasionalis fanatik. Hatta berkata:

“Kalau kita mau mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia seluruhnya, seperti yang dicita-citakan selama ini oleh pergerakan nasional kita, tentu politik yang kita jalankan berlainan dengan politik yang ditujukan hanya untuk Republik sendiri. Untuk itu perlu diadakan perundingan dengan Belanda yang menguasai sebagian dari Indonesia di luar Republik. Jangan kita mau diadudombakan, namun mencari persesuaian dan persatuan. Karena sentimen belaka kita mudah mencela negara-negara boneka yang didirikan Belanda, namun baiklah kita sadarkan politik kita pada kenyataan bahwa rakyat di sana juga ingin merdeka dan melihat kepada Republik sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia... Kita tidak boleh mengadakan politik antitesis terhadap saudara-saudara kita sebangsa di luar daerah aman Republik, tetapi harus mengemukakan politik sintesis. Bersama mereka kita akan mendirikan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat...”

Pada tanggal 1 November 1948, Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Dirk Stikker, berkunjung ke Indonesia. Dalam perundingannya dengan Hatta, agaknya Stikker bersikap agak lunak terhadap kemerdekaan Indonesia sehingga ada pendekatan antara gagasan Hatta dan pikiran Stikker. Ketika Dr. Stikker pulang ke Nederland pada tanggal 11 November, ia menerima *aide memoire* dari Hatta. Apa isinya tidak pernah diumumkan. Dalam kunjungannya kembali ke Indonesia beserta Menteri Urusan Seberang Lautan, Dr. Sassen, Hatta menegaskan bahwa tafsiran Stikker tentang *aide memoire*-nya tidak tepat. Tafsiran Stikker itu mungkin terpengaruh oleh suasana politik di Nederland dan pendirian Menteri Sassen, yang memegang urusan jajahan sehingga pendirian yang semula disangka saling



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pihak Belanda akan berhasil menggugurkan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pihak Belanda membujuk Sri Sultan untuk bekerja sama dengan tawaran jabatan wali negara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Madura, dalam kerangka pembentukan Negara Indonesia Serikat. Tawaran itu memang menarik sekali, apalagi mengingat wilayah kesultanan Yogyakarta yang dijadikan daerah istimewa, terlalu sempit jika dibandingkan dengan luasnya wilayah yang ditawarkan itu. Lagi pula dalam pemerintahan Republik Indonesia, ia hanya dijadikan menteri negara tanpa *portepel*. Sebelum pendudukan tentara Jepang, Sri Sultan sudah bekerja sama dengan Belanda berkat kedudukannya sebagai Sultan Yogyakarta. Pihak Belanda berpikir bahwa ajakan kerja sama itu pasti diterima, mengingat kebanyakan kaum feodal di wilayah Indonesia bersedia berkerja sama dengan Belanda. Akan tetapi, Sri Sultan dengan tegas menolak tawaran itu dengan ucapan bahwa ia adalah menteri negara Republik Indonesia yang setia. Jawaban itu sangat mengejutkan pihak Belanda karena tanpa bantuan Sri Sultan, pembentukan pemerintahan di Yogyakarta akan mengalami banyak kesulitan. Bujukan Belanda dan sikap Sri Sultan itu tersiar di kalangan rakyat Yogyakarta pada waktu itu. Berkat kesetiaannya kepada Republik Indonesia yang demikian itu, Sri Sultan sangat dicintai oleh rakyat dan kaum gerilyawan, dan menjadi suri teladan bagi penduduk umumnya dan para pejuang khususnya. Baik penduduk maupun para pejuang meskipun menderita sangat hebat dalam soal material dan setiap saat hidupnya terancam, mereka segan bekerja sama dengan Belanda.

Dalam usaha membentuk pemerintahan, pihak Belanda mendekati golongan bekas pegawai kolonial sebelum pendudukan tentara Jepang. Ada beberapa yang berhasil dibujuk dan menerima tawaran kerja sama secara sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh kawan-kawannya, namun jumlahnya terlalu kecil, boleh dikatakan hanya beberapa segelintir saja. Mereka malu dikatakan “menyeberang”. Boleh dikatakan mereka itu hanya menerima gaji buta karena takut bekerja di kantor. Ketika SMA Negeri di Kotabaru dibuka kembali oleh pihak Belanda dengan bantuan beberapa guru, dari zaman



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Wonosari memang bukan sarang gerilyawan atau tempat bersembunyi pemerintahan darurat sehingga serangan balasan itu tidak menemui sasarannya.

Di pertahanan sektor utara dan barat, para gerilyawan hidup di antara rakyat, tidak berbeda dengan petani-petani dan anak desa yang bekerja di sawah. Karena angkatan bersenjata mengadakan pertahanan total maka semua tenaga dikerahkan. Jadi, anak-anak desa pun ikut bergerak melawan tentara Belanda. Meskipun hidupnya serba kekurangan, dengan senang hati para petani menerima gerilyawan-gerilyawan kota di rumahnya, bahkan menganggap mereka sebagai anggota keluarganya. Tentara pelajar yang masih muda-muda, diperlakukan sebagai anaknya sendiri, anggota TNI yang sudah agak tua dipandang sebagai saudara. Demikianlah, para gerilyawan di desa-desa menemukan orang tua baru dan para petani merasa mendapat anak atau saudara angkat. Hubungan akrab yang demikian menimbulkan keyakinan pada para gerilyawan bahwa perlawanan kepada tentara pendudukan Belanda akan berhasil baik meskipun masa gerilya itu mungkin akan memakan waktu sangat lama. Kekompakan antara gerilyawan dan rakyat merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemenangan. Dalam masa perjuangan, dirasakan benar kemesraan antara rakyat dan para gerilyawan, yang didasarkan terhadap cita-cita bersama, yaitu kemenangan dan kemerdekaan serta harapan akan mendapat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mereka bersedia berkorban dan memikul segala macam penderitaan bersama-sama untuk tujuan yang mulia.

Di antara para pembesar dan sarjana kenamaan, banyak juga yang bergerak sebagai gerilyawan dan hidup di pedesaan. Nama-nama seperti Mr. Susanto Tirtoprodjo, I.J. Kasimo, Supeno, dan Mr. Lukman Hakim tidak asing bagi orang-orang desa di daerah Cawas. Mereka itu adalah gerilyawan. Prof. Dr. Sardjito, Dekan Fakultas Kedokteran, dan Prof. Ir. H. Johannes tidak ketinggalan, apalagi mahasiswa dan murid-murid sekolah menengah yang telah bergabung ke dalam kesatuan Tentara Mahasiswa dan Tentara Pelajar sejak awal revolusi. Mereka itu menjalankan gerilya baik di dalam maupun di



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

sejumlah pembicara dalam sidang Dewan Keamanan, pengembalian RI adalah syarat mutlak untuk dapat mengadakan pembicaraan yang akan berhasil karena hanya dengan demikian pemerintah RI dapat memutuskan sesuatu secara merdeka, lepas dari suatu tekanan,

5. Oleh karena itu pembicaraan permulaan hanya mengenai pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta sampai ke detil-detil yang praktis, dan
6. Untuk memperoleh keterangan-keterangan sebagai bahan perundingan, diperlukan bantuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Jawaban Mr. Roem disampaikan kepada KTN tanggal 2 April 1949, lebih dari dua bulan sesudah resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari. Pelaksanaan resolusi merupakan hal yang sangat mendesak karena perang gerilya terus menerus berkobar. Pembumihangusan barang-barang vital tetap dilakukan, pengejaran pihak Belanda tidak ada hentinya. Para gerilyawan ingin menunjukkan bahwa tentara pendudukan Belanda di Yogyakarta tidak dapat membentuk pemerintahan yang aman dan teratur. Keamanan dan ketenteraman akan kembali jika tentara Belanda ditarik mundur.

Berkaitan dengan jawaban Mr. Roem tersebut di atas, Sri Sultan pada 11 April terbang ke Jakarta untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Kepada KTN ia menegaskan bahwa ia sanggup menjamin keamanan di daerah Republik Indonesia jika Yogyakarta dikembalikan kepada RI dan tentara Belanda ditarik mundur. Berdasarkan jaminan Sri Sultan itu, perundingan pendahuluan dapat segera dimulai. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Mohammad Roem, dengan anggota-anggotanya adalah Mr. Ali Sastroamidjojo (wakil ketua), Dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Supomo, dan Mr. Latuharhary. Bertindak sebagai penasihat adalah Sutan Syahrir, Ir. Laoh, Mohammad Natsir, Dr. Darmasetiawan, dan Mr. Sumarto. Delegasi Belanda diketuai oleh Dr. J.H. Van Royen, dengan anggota-anggotanya adalah Mr. Blom, Mr. Jacob, Dr. Vander Velde, Dr. P.J. Koets, Mr. Van



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

sesuai dengan pesan yang mereka tinggalkan sebelum menjalani pengasingan. Kedatangannya disambut oleh masyarakat Yogya dengan sangat meriah. Pada tanggal 10 Juli, Dr. Leimena kembali dari Bukittinggi bersama para pembesar PDRI. Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Gerilya, sudah masuk kota secara diam-diam. Hanya Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, yang tidak tampak karena telah gugur di daerah Nganjuk. Sambil bersilaturahmi dengan para pembesar pemerintahan, diadakan sidang kabinet yang pertama sesudah pemulihan kembali Republik Indonesia. Dalam sidang kabinet itu, Kepala Negara PDRI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, menyerahkan kembali mandatnya kepada kepala negara lama, yang diterima dengan ucapan terima kasih karena tugas mendadak yang dipikulkan di atas pundaknya telah ditunaikan dengan memuaskan. Susunan kabinet mengalami sekadar perubahan berhubungan dengan gugurnya Menteri Supeno dan keinginan kabinet untuk menyatakan tanda terima kasih dan penghormatan kepada Sri Sultan, koordinator keamanan dan ketertiban di wilayah Yogyakarta, yang juga menjadi menteri negara, berupa pengangkatannya sebagai menteri pertahanan merangkap menteri pembangunan dan pemuda.

Jenderal Sudirman naik-turun gunung, dipikul di atas tandu, memimpin perang gerilya. Berkaitan dengan pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan pernyataan Roem-Van Royen, presiden memberi perintah agar Jenderal Sudirman segera kembali memasuki Yogyakarta. Meskipun hasrat memimpin perang gerilya di luar daerah Yogyakarta masih menyala-nyala di dalam dada, yang sudah terasa sesak, sebagai anggota tentara ia tunduk kepada perintah presiden. Jenderal Sudirman memasuki kota Yogyakarta, dipikul di atas kursi yang dirakit dengan bambu, bertutup kain. Hanya berkat semangat nasional yang berkobar-kobar dan kemauan keras untuk memimpin perjuangan fisik bangsa Indonesia, badannya yang telah lemah-lunglai itu masih bertahan. Kewajiban memimpin perang gerilya telah ditunaikan dengan baik. Tugas baru menunggu; melaksanakan gencatan senjata sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan dan pernyataan Roem-Van Royen.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

karena ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat kuat. Penjagaan keamanan ada di tangan tentara Belanda sepenuhnya sehingga para pemegang kekuasaan tidak dapat berkutik sama sekali. Segala tindak-tanduknya diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa pada hakikatnya mereka itu hanya dipakai oleh pihak Belanda sebagai perisai untuk menghadapi Republik Indonesia, pemerintahan yang mereka pimpin hanya pupuk bawang. Kepemimpinan mereka di wilayahnya masing-masing adalah hadiah van Mook semata-mata karena tidak ada dukungan rakyat. Kepemimpinan itu menjadi goyah dengan meningkatnya gengsi golongan pro Republik Indonesia akibat pemulihan kembali Republik Indonesia ke Yogyakarta. Oleh karena itu, hubungan dengan Republik Indonesia paling sedikit sama nilainya dengan hubungan dengan Belanda. Tidak boleh dimungkiri bahwa di antara para pemimpin negara di lingkungan BFO, juga banyak yang berjiwa nasional dan merindukan kemerdekaan seperti di wilayah Republik Indonesia. Hanya jalan yang mereka tempuh menuju kemerdekaan berbeda akibat perluasan kekuasaan kolonial. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta membangkitkan kembali kesadaran nasional yang masih membara di dalam kalbunya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri ialah menggalang kekuatan dengan Republik Indonesia dalam menghadapi perundingan Konferensi Meja Bundar yang akan datang. Untuk tujuan itu, mereka akan menyokong sepenuhnya tuntutan penyerahan kemerdekaan penuh, tanpa syarat dari pemerintah Nederland kepada Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk dalam perundingan KMB. Demikianlah, pemberian dukungan terhadap tuntutan kemerdekaan penuh itu tidak didorong semata-mata oleh kemurnian cita-cita nasional, seperti yang dimiliki oleh sebagian besar pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, tetapi mengandung pamrih. Meskipun demikian, dukungan itu berguna sekali bagi Republik Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar. Untuk memperoleh dukungan itu, Republik Indonesia harus merangkul BFO. Demikianlah, dalam menghadapi perundingan Konferensi Meja Bundar, pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan BFO saling membutuhkan.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Dalam bidang perburuhan, perumahan, dan kesejahteraan sosial di lingkungan perusahaan baik Belanda maupun Indonesia, berlaku peraturan-peraturan yang sama. Perusahaan di wilayah Republik Indonesia Serikat diwajibkan mengadakan kursus latihan kepemimpinan untuk warga negara Indonesia dengan tujuan agar dalam waktu yang layak, staf pimpinan perusahaan sebagian besar terdiri dari warga negara Indonesia.

Dua perkara yang merupakan perdebatan hangat antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda adalah soal utang piutang dan kedaulatan Irian barat. Hanya berkas usul kompromi pihak Komisi PBB yang menghendaki agar piagam Persetujuan Konferensi Meja Bundar dapat ditandatangani sebelum tanggal 30 Desember 1949, kedua delegasi dapat didamaikan. Ternyata bahwa kedua perkara tersebut merupakan pangkal perselisihan dan keonaran antara pihak Indonesia dan pihak Belanda hingga berlarut-larut setelah serah terima kedaulatan. Hal itu akan dibahas kemudian.

Piagam Persetujuan Konferensi Meja Bundar bagi pihak Indonesia hanya merupakan batu loncatan untuk mencapai pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan isi piagam setelah serah terima kedaulatan mengalami berbagai macam kesulitan, yang mengakibatkan kegagalan dan konfrontasi antara Indonesia dan Nederland.

Sekembalinya ke tanah air, Perdana Menteri Hatta memberikan laporan kepada kabinet mengenai hasil perundingan Konferensi Meja Bundar dalam sidang kabinet tanggal 16 November 1949. Dengan suara bulat, kabinet menerima hasil perundingan dan menyarankan agar secepatnya dimintakan pengesahan sidang pleno KNIP. Berhubung dengan keadaan, ratifikasi dilakukan dalam sidang BP KNIP tanggal 25 November 1949. Di luar sidang, ada golongan yang merasa tidak puas dan ada golongan yang merasa gembira dengan hasil perundingan Konferensi Meja Bundar. Yang merasa tidak puas melontarkan kecaman bahwa delegasi Indonesia terlalu banyak mengalah. Terhadap kritik yang demikian, Hatta memberikan keterangan sebagai berikut:



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

serah terima pemerintahan Hindia-Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan di Yogyakarta Presiden Soekarno menerima Republik Indonesia ke dalam Republik Indonesia Serikat dari Pejabat Presiden Assaat. Pada saat itu, berakhirilah masa penjajahan Belanda di Indonesia dan mulai berdiri Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Setelah upacara, pada hari itu juga Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink meninggalkan Indonesia menuju Nederland.

Serah terima kedaulatan atas Indonesia dari pemerintah Nederland kepada Republik Indonesia Serikat pada umumnya disambut dengan gembira. Di bekas daerah Republik Indonesia, terutama di Yogyakarta, serah terima itu ditafsirkan sebagai pengakuan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan dipandang sebagai kemenangan pihak Republik Indonesia dan kekalahan pihak Belanda meskipun serah terima itu berlangsung dari pihak pemerintah Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, tidak kepada Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat adalah suatu bentuk kompromi antara keinginan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Nederland, penggabungan antara Republik Indonesia dan negara-negara BFO, namun hal itu tetap dirasakan sebagai kemenangan Republik Indonesia.

Di lingkungan BFO, serah terima kedaulatan itu memberi kelegaan kepada rakyat, yang selama pendudukan hidupnya tertekan di bawah ancaman tembakan bedil dan tusukan bayonet tentara Belanda. Hal itu berarti berhentinya penangkapan-penangkapan unsur gerakan nasional, bahkan pelepasan tahanan-tahanan politik, berkumpulnya para pejuang Republik di bawah satu naungan bendera sang Merah-Putih, dan kebebasan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk pertama kalinya, mereka menghirup udara kemerdekaan. Saat itu dianggap sebagai titik permulaan bergerak bebas untuk mengatur daerahnya dengan usaha, tenaga, dan menurut keinginannya sendiri tanpa campur tangan pihak asing.

Di luar negeri, terutama di dua puluh satu negara yang menghadiri Konferensi New Delhi tanggal 20-23 Januari 1949, yakni



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Meskipun pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 2 Mei 1950 mendesak pemerintah Inggris di Singapura untuk menyerahkan Westerling, desakan itu tidak dihiraukan karena antara Inggris dan Republik Indonesia Serikat tidak ada perjanjian ekstradisi. Untuk menghindari segala sengketa dan kesulitan, pemerintah Inggris di Singapura mengusir Westerling. Westerling kemudian mengungsi ke Tangier, lalu ke Paris, dan baru pada tahun 1952 muncul di Nederland. Pihak Republik Indonesia menuntut pemerintah Belanda untuk menyerahkan Westerling, namun Mahkamah Tinggi Nederland menolak tuntutan itu dengan alasan bahwa Westerling adalah seorang warga negara Belanda. Ia akan diadili di Nederland atas tuduhan melarikan diri dari tugas militer, pembunuhan, dan perkosaan. Demikianlah, usaha Republik Indonesia gagal menuntut penyerahan Westerling.

Kedatangan tentara APRA ke Jakarta mempunyai hubungan dengan sikap Sultan Hamid Algadrie II, menteri negara tanpa *portepel* dalam kabinet Republik Indonesia Serikat. Meskipun demikian, hubungan itu baru terbongkar pada tanggal 5 April ketika pada pukul 03.00 pagi, ia dipecat dari jabatannya dan ditahan keesokan harinya. Dalam pembelaannya dua tahun kemudian, ia menuduh pemerintah mengkhianati Persetujuan KMB. Ia merasa wajib mematuhi piagam tersebut dan membela negara federal Republik Indonesia Serikat, yang dikhianati oleh golongan Republik Indonesia. Sultan Hamid dipersalahkan dan dijatuhi hukuman penjara delapan tahun dipotong masa tahanan.

Terkait dengan peristiwa APRA di Bandung dan Jakarta, tentara APRIS di daerah-daerah bertindak keras dan ketat. Kolonel Gatot Subroto di Semarang mendatangi Kolonel Mollinger dengan ancaman bahwa semua Belanda yang ada di kota Semarang akan dibunuh jika mereka berbuat huru-hara atau kerusuhan. Di Semarang, kedudukan tentara APRIS sangat kuat sehingga tentara Belanda tidak bisa berkutik. Demikian pula halnya dengan tentara APRIS di Surabaya. Di Medan dan Palembang, tentara APRIS demi keamanan dan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Republik Indonesia Serikat, kabinet Republik Indonesia Serikat didemisionerkan. Kabinet baru akan dibentuk oleh formatur yang akan ditunjuk oleh Presiden Soekarno dalam waktu singkat. Penggantian Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan piagam Persetujuan KMB karena pasal 1 dari piagam itu mengatakan dengan jelas bahwa pemerintah Nederland menyerahkan kedaulatan penuh atas wilayah Indonesia kepada negara Republik Indonesia Serikat. Atas dasar itu, Republik Indonesia Serikat berhak mengubah Undang-undang Dasarnya menurut keinginannya sendiri. Lagi pula pasal 190 memuat ketentuan bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat boleh diubah apabila dapat diambil keputusan dengan permufakatan sidang Senat dan DPR Republik Indonesia Serikat, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota sidang. Dari pembahasan di atas, syarat itu jelas dipenuhi. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum baik perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia maupun pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sah, tidak dapat diganggu gugat.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

INDEKS

A

Abdulkahar Muzakkir [19](#)
Abikusno Cokrosuyoso [19](#), [20](#),
154
Adam Malik [26](#), [29](#), [48](#), [72](#), 75
Admiral Maeda [36](#)
Agus Salim [19](#), [20](#), [21](#), [48](#), [94](#),
120, [134](#), 135, 136, 160,
[163](#), 204, 205, 206, 257
Ahmad Subardjo [19](#), [72](#)
Ali Sastroamidjojo 71, [110](#), 111,
127, 137, 166, [226](#), 231
Alimin 67, 173
Amerika Serikat 120, 121, 125,
[126](#), 129, 156, 157, 158,
[159](#), 161, 162, 218, 219,
220, 222
AMRI 64
Anak Agung Gde Agung 197,
218, 245, 246, 247, 255
Angkatan Muda Republik
Indonesia 64, 68
Angkatan Perang Ratu Adil
259, 260

Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat 243, 258
Anwar Cokroaminoto [4](#), 127,
266
APRA 259, 260, [261](#), 265, 266
APRIS 243, 251, 258, 259,
260, [261](#), 262, 263, 264,
265, 267
Australia [1](#), [2](#), [6](#), [21](#), 53, 60,
61, 67, [118](#), 120, 124,
125, [126](#), 127, 141, 142,
170, 218, 221, 222, 249

B

Badan Keamanan Rakyat 50
Badan Penyelidik Persiapan
Kemerdekaan Indonesia [19](#)
Badan Permusyawaratan Pelajar
Indonesia [29](#)
Baperpi [29](#)
Belgia 120, 121, 124, 125,
[126](#), 127, 129, 219, 220,
222
BFO 140, [196](#), 198, 233, 235,
[236](#), 237, 238, 239, 240,

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

- 241, 245, 246, 247, [248](#),
253, 255, 256, 257, 258,
259, 266
- Bijeenkomst voor Federaal
Overleg 140, 233
- BKR 50, 51, 55, 57, 58, 64
- BPPKI [19](#), [20](#), [21](#), [22](#)
- Brasilia 120
- Brigadir Jenderal Mallaby 59, 60
- ### C
- Cina [3](#), 16, 53, 67, 120, 121,
124, 125, 143, 192, 218,
219, 220, 221, 240, 249
- Columbia 120, 219, 220
- ### D
- D.N. Aidit [28](#), [29](#), 132
- Dai Nippon [7](#), 10, 11, [13](#), [14](#),
[15](#), [19](#), [22](#), [23](#), [26](#)
- Daidan [17](#), 49
- Daidanco 27, 49
- Darul Islam 208
- demokrasi liberal 64, 156, 157,
254
- devide et impera 194
- Dewan Federal [139](#)
- Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa [122](#), 128
- Dewan Konstituante 141, 142,
222, 268
- Dewan Perwakilan Rakyat 47,
63, 64, [66](#), 80, 81, 100,
141, 142, 191, 237, 239,
240, 242, 245, 253, 267,
268
- Divisi Siliwangi [152](#), 175, [176](#),
177, 178, 185, 186, 189,
208
- Djuanda [94](#), 127, [134](#), 135,
137, [226](#), 246, 254, 256,
257
- Dokter Cipto Mangunkusumo [24](#)
- Dokuritau Jumbi Cosakai [19](#)
- Dr. A.K. Gani [1](#), [52](#), [94](#), 95
- Dr. Dirk Stikker [196](#)
- Dr. G.S.C. Ratu Langie 61
- Dr. Sukiman [48](#), [72](#), 231
- dwi tunggal Soekarno-Hatta [4](#)
- ### F
- FDR [110](#), 143, 144, 145, 146,
149, 153, 154, [167](#), 169,
[171](#), 173, 174, 178, 179,
182, [183](#), 186, 187
- Front Nasional [163](#), 164, 166,
[167](#), 179, 180, 181, 182
- Fujinkai [14](#), [15](#), 16
- ### G
- Gatot Mangkupradja 12, [13](#), 84
- Gerakan Tiga A [8](#)
- ### H
- Hatta [4](#), [5](#), [8](#), [9](#), [19](#), [20](#), [23](#),
[24](#), [25](#), 27, [28](#), [32](#), [33](#),
34, 35, [36](#), 37, 38, 39,
[40](#), 47, 54, 55, [66](#), [73](#),
[74](#), 75, 77, 80, [82](#), 83,
84, 87, 88, 91, 96, [102](#),
103, [134](#), 135, 136, 137,
138, 143, 144, 148, 149,
151, [152](#), 153, 154, 160,
161, 162, [163](#), 166, [167](#),
168, 169, 170, [171](#), 174,
177, 178, 180, 181, [183](#),
186, 193, 195, [196](#), 198,

203, 204, 205, 208, 209,
227, 231, 238, 239, 241,
242, [244](#), 246, 247, 249,
250, [254](#), 255, 256, 257,
267

Heiho 46, 49, 50

Hi No Manu [7](#)

Hindia Belanda [6](#), [33](#), 60, 93,
95, 128, 129, 131, 206

I

ibu Inggit [1](#)

Inggris 10, 53, 54, 56, 57, 58,
59, 60, 87, 95, 116, 120,
121, 156, 180, 219, 220,
[261](#)

J

J. Leimena 95, 137, 246, 256,
257, 265

Jakarta [3](#), [4](#), [6](#), [8](#), [9](#), 12, [13](#),
[19](#), [20](#), [23](#), 27, [28](#), 35,
[36](#), 38, 39, [48](#), 50, 51,
55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 68, 75, 87, 89, [90](#),
95, 105, 115, 123, 125,
[126](#), 143, 178, 197, 201,
206, 220, 225, [226](#), 235,
238, 239, 247, [254](#), 260,
[261](#), 262, 263, 265

Jawaharlal Nehru 241

Jenderal Hawthorn 59, 60

Jenderal Imamura [3](#), [5](#)

Jenderal Spoor 210, 217

Jepang [1](#), [2](#), [3](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#),
10, 11, 12, [13](#), [14](#), [15](#),
16, [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [21](#),
[22](#), [24](#), [25](#), [26](#), 27, [28](#),
[29](#), [31](#), [32](#), [33](#), 34, 35,

[36](#), 37, 38, 39, [48](#), 49,
50, 51, 53, 54, 57, 58,
61, 65, [66](#), 70, 71, [73](#),
[74](#), 76, 79, 80, [82](#), 83,
84, [86](#), 88, 121, [122](#), 150,
155, 156, 180, 192, [211](#)

K

Kabinet Hatta [134](#), 136, 137,
143, 148, 149, 151, 153,
154, 161, 162, [163](#), [167](#),
[171](#), 174, 178

Kabinet Pisau Cukur 135, 136,
148

“Kabinet Pisau Cukur” 136

Kabinet Syahrir 79, 88, [110](#)

Kahar Muzakar 263

Kaisar Tenno Heika [5](#)

Kantor Berita Domei 37, 38

Kapten Raymond Westerling
259, 260

keibodan 12

Kemakmuran Bersama Asia
Timur Raya 10

Ki Bagus Hadikusumo [9](#)

Ki Hadjar Dewantara [8](#), [82](#), [83](#),
84, 105

Kiai H. Mas Mansur [8](#)

Kiai Haji Zainal Mustafa [17](#)

Kimi Gayo [7](#)

KMB 223, [236](#), 245, 247, 250,
258, 259, 260, [261](#), 263,
[269](#)

KNIL 51, 55, 61, [62](#), 69, 84,
243, 251, 258, 259, 260,
262, 263, 264, 265, 266

KNIP 47, [48](#), 64, [66](#), 75, 76,
77, [78](#), 81, 84, 87, 88,
93, 100, [102](#), 103, 104,

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

- 137, 151, 154, 163, 167,
172, 173, 174, 183, 184,
198, 238, 244, 245, 267,
268
- Kolonel Fujiyama 2, 3
Kolonel Nasution 181, 207,
208, 263
Kolonel Sudirman 52, 58, 175
Komisi Perserikatan Bangsa-
Bangsa 228, 241
Komisi Tiga Negara 126, 129,
130, 131, 132, 201, 203,
218, 219
Komite Nasional Indonesia
Pusat 47, 75, 167
komunisme 156, 157, 158, 170
Konferensi Antar Indonesia
237, 238, 239, 246, 247
Konferensi Meja Bundar 223,
224, 227, 233, 236, 237,
241, 242, 244
Konferensi New Delhi 218, 248
Kongres Calcutta 159
Koninklijk Nederlans Indisch
Leger 243
KTN 126, 127, 128, 130, 132,
138, 139, 141, 142, 143,
197, 198, 218, 220, 222,
223, 225, 226
Kweekschool 14
- L**
Letnan Kolonel Slamet Rijadi 265
liberalisme 158
- M**
Madura 9, 13, 17, 19, 21, 28,
52, 59, 89, 90, 93, 96,
97, 107, 123, 130, 138,
211, 220, 253, 258, 266
Mahkamah Pengadilan Inter-
nasional 242
Majelis Permusyawaratan
Rakyat 44, 47, 77, 78, 81
Maramis 19, 20, 21, 47, 136,
204
Markas Tertinggi Tentara Ke-
amanan Rakyat 56
Marxisme 28, 67, 68, 69, 156
Masyumi 72, 73, 84, 86, 89,
94, 99, 100, 104, 110,
111, 127, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 144,
145, 146, 148, 160, 166,
167, 182, 255
Menteng 31 28, 29, 66
Moh. Natsir 127, 231, 257
MPR 44, 240
Mr. Moh. Roem 55, 72, 94, 95,
97, 127, 205, 245, 246,
247
Mr. Sjafruddin Prawiranegara
202, 203, 224, 225, 231, 232
Mr. Sjamsuddin 8, 127
Mr. Subarjo 23, 27
MT TKR 57
Muh. Yamin 19, 92, 93
Muhammadiyah 72, 99
Murba 143, 208, 245
Musso 161, 162, 163, 164, 166,
178, 179, 180, 181, 183,
186, 187, 188
- N**
Nahdhatul Ulama 72
nasionalisme religius 41

- Negara Indonesia Serikat 129, 138, 141, 142, [171](#), 194, 197, 198, [211](#), 218, 222, 227, [236](#), 237, 238
- Negara Indonesia Timur 218, 259, 262, 263, 264, 266, 267
- Negara Kesatuan Republik Indonesia 258, 266, 267, 268, [269](#)
- Negara Republik Indonesia Serikat 242, 253
- Netherlands Indies Civil Administration 55
- NICA 55, 58, 60, 61
- NIT [139](#), 140, 197, 218, 250, 251
- NU [72](#)
- P**
- pancasila 42
- Panglima Besar Jenderal Sudirman 91, 117, 184
- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [23](#), [32](#), [33](#), [36](#), 39, [40](#), 45, 47
- Paras 64, 65, 79, 80, 91
- Parsi 64, 65, 79, 80
- Partai Buruh Indonesia [66](#), 111, 132, 164, 165
- Partai Katolik Republik Indonesia [73](#), 111
- Partai Komunis Indonesia 67, [110](#), 111, 146, 164, 165, 166
- Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia [72](#)
- Partai Nasional Indonesia [4](#), 47, 77, [110](#), 111, 131, 132, 133, 160, 166
- Partai Rakyat Sosialis 64, 79
- Partai Sarekat Islam Indonesia [72](#)
- Partai Sosialis Indonesia 64, [66](#), 79, [110](#), 165, 166, 245
- Partindo [4](#)
- PBB 118, 119, 198, 218, 220, 223, 224, [244](#), 249
- PBI [66](#), 67, 68
- PDRI 203, 220, 225, 231, [232](#)
- Pembela Tanah Air 12, 35
- pemberontakan Andi Azis 262, 263, 264, 266
- Penghela Rakyat 68
- Perang Asia Timur Raya 10, 16, [21](#), [22](#)
- “perang dingin” 158
- Perang Dunia II 156, 157, 193
- Perang Gerilya 212
- Perang Pasifik 10, [28](#), 53, 121
- Perdana Menteri Nehru 218, 241
- Peristiwa Madiun [190](#)
- Persetujuan Linggajati 95, 96, [98](#), 99, 100, 101, [102](#), 103, 104, 105, 107, 109, [110](#), 111, 115, 116, 118, [122](#), 129, 155, 164, 193, 206, 221, 228
- Persetujuan Renville 128, 129, 131, [134](#), 136, 137, 138, [139](#), 141, 148, [152](#), 155, 175, 191, 197, 198, 208, 218, 219
- Perundingan Renville [126](#), 127
- Peta 12, [13](#), [15](#), [17](#), [26](#), 27, 35, 46, 49, 50, 51, 69, 84, 172, 173
- Piagam Jakarta [19](#), [20](#)
- PKI 67, 68, [73](#), [90](#), 132, 143, 164, 165, 166, [167](#), 172,

Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan

- 175, 177, 179, 182, [183](#),
184
- PKRI [73](#), [98](#), 111, [134](#), 135,
136
- PNI 12, 65, [70](#), 71, [72](#), 84,
[86](#), 89, [94](#), 99, 100, 104,
[110](#), 132, 133, [134](#), 135,
136, 137, 145, 148, 166,
[167](#), 182
- Polandia 118, 120, 124, 125,
156
- PPKI [23](#), [62](#)
- Prancis 53, 118, 120, 121,
156, 157, 219, 220
- PSII [72](#), [134](#), 135, 145
- Pulau Enggano [2](#)
- Pulau Jawa [6](#), [9](#), 203
- Putera [8](#), [9](#), 16, [28](#), [82](#), 264
- R**
- “Rencana Bantuan Marshall”
158
- Rengas Dengklok 35, [36](#)
- Republik Maluku Selatan 264
- RIS 67, 238, 245, 246, 247
- RMS 264, 265, 267
- Roem-Van Royen 228, 229,
[232](#), 233
- Romusa 11
- Rusia [22](#), [28](#), [31](#), 53, 68, 81,
118, 120, 125
- S**
- Sajuti Melik 37, 93
- Sartono [4](#), [21](#), 47, 71
- Sayap Kiri [110](#), 132, 133, [134](#),
135, 136, 137, 143, 144,
146, 148, 149, 150, 151,
154, 155, [163](#), [167](#), 173,
178, 185
- Seinendan 12
- Sentral Organisasi Buruh
Seluruh Indonesia 164
- Sir A Clark Kerr 89
- SOBSI 69, 164, [171](#), 172, 173
- Soekarno [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [8](#), [9](#),
10, [13](#), 16, [19](#), [20](#), [22](#),
[23](#), [24](#), [25](#), 27, [28](#), [31](#),
[32](#), [33](#), 34, 35, [36](#), 37,
38, 39, [40](#), 47, 49, 50,
54, 55, 57, 59, 60, 64,
[70](#), 71, [73](#), [74](#), 75, 80,
[82](#), 83, 84, 87, 88, 91,
92, 96, [102](#), 111, 112,
116, 119, 140, 161, 162,
177, 180, 181, [183](#), 186,
188, 193, 204, 205, 206,
208, 209, 224, 225, 227,
231, 233, 237, 245, 246,
[248](#), 254, 257, 268, [269](#)
- Sri Sultan Hamengkubuwono IX
[226](#), 256
- Sultan Hamid Alagdrie II 241
- Syria 120, 125, 218, 219, 220,
221, 222, 249
- T**
- Tan Malaka [26](#), 27, 71, [72](#), [73](#),
[74](#), 75, 79, [82](#), 83, 84,
85, [86](#), 87, 88, [90](#), 91,
92, 93, 154, 180, 208
- Tentara Nasional [48](#)
- tentara nasional 69
- tentara sekutu 12, [31](#), 49, 54,
57, 58, 60, 61, 64, 76,
[86](#)

TNI Masyarakat 150, [152](#), 153,
168, 175, 179
Tokyo [5](#), [9](#), [14](#), [18](#)
"Truman Doctrine" 158

U

Undang-Undang Dasar [19](#), 39,
[40](#), 41, 42, 43, [44](#), 45,
46, 81, 89, 100, 142, 171,
246, 253, 254, 266, 268,
[269](#)

Undang-Undang Dasar 1945
81, 254

Undang-Undang Dasar Semen-
tara 247, 253, 266, 268,
[269](#)

Uni Soviet 156, 157, 158, [159](#),
160, 161, 162, [163](#), 165,
168, 170, [171](#), 178, 219,
220, 222, 249

Universitas Gadjah Mada 109

"Usul Critchley-Du Bosi" 141

"Usul Natal Komisi Tiga
Negara." [130](#)

V

Van der Plass [24](#)

Van Kleffens 118, 120, [122](#),
123, 124

Van Mook 53, 54, 67, 87, [90](#),
[106](#), 109, 112, 113, 115,
137, 138, [139](#), 191, 192,
193

W

Wachid Hasdjim [19](#)

Wikana [28](#), [32](#), 34, [36](#), 68,
89, [94](#), 188

Willem Drees 194, 206

Woworuntu [2](#)

Y

Yogyakarta 51, [52](#), 55, 58, 68,
[73](#), [90](#), 91, 92, 93, [98](#),
100, 109, 115, [122](#), [126](#),
138, [147](#), 154, 161, 162,
[167](#), [176](#), 179, [183](#), 188,
201, 202, 203, 205, 206,
207, 209, 210, [211](#), 212,
215, 217, 218, 219, 221,
222, 225, [226](#), 228, 229,
230, 231, [232](#), 235, [236](#),
238, 245, 246, [248](#), 256,
258



KESADARAN NASIONAL DARI KOLONIALISME SAMPAI KEMERDEKAAN

Penerbitan buku ini adalah momentum yang tepat dalam rangka memperingati Satu Abad Kebangkitan Nasional. Satu abad yang lalu, pemoeda-pemoeda Indonesia mengikrarkan diri dalam satu tekad; Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia. Tekad ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemoeda.

Buku ini selayaknya ditempatkan pada konteks pemupukan kesadaran nasional atau pengabdian kepada nusa dan bangsa; sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri dan golongan; dan penguatan mentalitas anak bangsa di tengah persoalan yang menghimpit bangsa dewasa ini. Itulah sebabnya, Slamet Muljana, penulis buku ini, mewajibkan nasionalisme atau kesadaran nasional menjadi pendidikan pokok dalam sejarah Indonesia, yang bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk dihayati.



ISBN 979-1283-57-5



9 789791 283571